

BAB II

KINERJA PEMERINTAH DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KABUPATEN BLORA

2.1. Kondisi Demografi dan Kondisi Sosial di Kabupaten Blora

2.1.1. Kondisi Demografi

Gambar 2.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Blora



Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

Kabupaten Blora, wilayah atas luas 6,01% (1.955,8219 Km²) Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk tahun 2020 sebesar 938.814 jiwa. Penggunaan daerah pemukiman 25,36304 Km² (13% dari wilayah Kabupaten Blora). Perbandingan lebih besar berasal dari jenis kelamin pria 469.730 jiwa, sedangkan wanita 469.084 jiwa. Pada tahun 2019, total penduduk yaitu, 925.642 jiwa. Artinya ada penambahan

penduduk 13.172 jiwa (1,42% dari total tahun 2019). Tetapi, pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Blora pernah mencapai titik negatif di tahun 2018. Dimana (-)/minus 9,165% dengan pengurangan penduduk sebesar 91.452 jiwa.

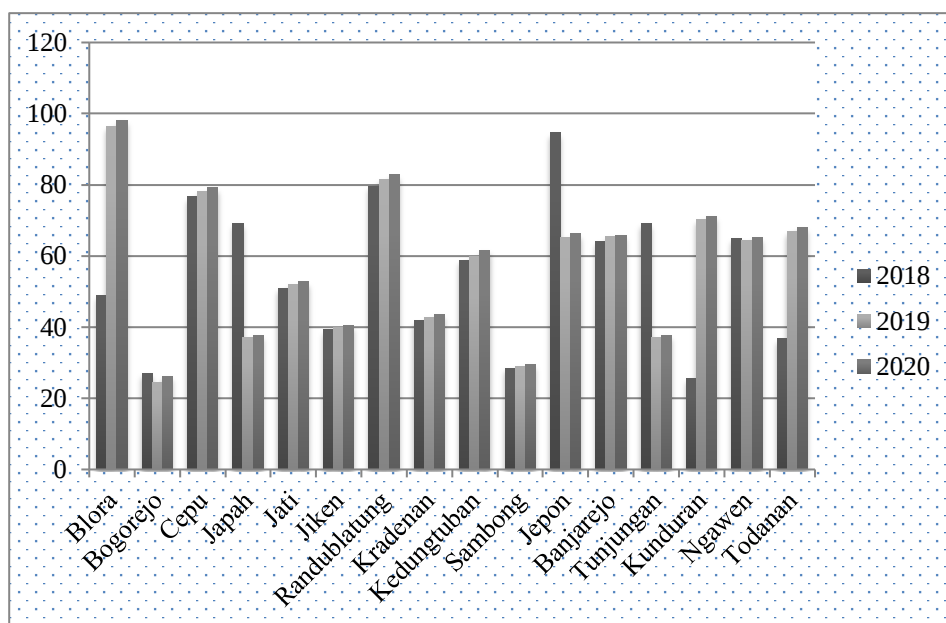
Hingga tahun 2019 naik kembali menjadi 2,12%, dari total tahun 2018 yaitu, 906.380 jiwa. Terpantau jelas gambaran turun naik nya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Blora. Kondisi fluktuatif pertumbuhan penduduk berasal dari persebaran 16 kecamatan wilayah. Penduduk terpadat pada tahun 2020 di Kabupaten Blora, ditempati Kecamatan Blora dengan jumlah 98.155 jiwa (10,46% dari total penduduk Kabupaten Blora), sedangkan terenggang ada di Kecamatan Bogorejo dengan jumlah penduduk 26.240 jiwa (2,80% dari total penduduk Kabupaten Blora). Padatnya jumlah penduduk Kecamatan Blora, dipengaruhi oleh area yang notabene perkotaan, sedangkan Kecamatan Bogorejo mayoritas wilayah lebih banyak di area perdesaan. Selain itu, pusat pemerintahan daerah dan perbelanjaan modern juga di Kecamatan Blora sehingga tidak jika terjadi kepadatan penduduk.

Tabel 1.11 Pertumbuhan Penduduk Periode Tahun 2018-2020

Jenis Kelamin	Periode Tahun		
	2018	2019	2020
Pria	453.433	462.252	469.730
Wanita	452.947	461.854	469.084
Pertumbuhan (%)	(-9,165)	2,12	1,59
Penambahan (Jiwa)	-91.452	19.262	13.172

Sumber: RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022

Gambar 1.2 Distribusi Persebaran Penduduk Per Kecamatan



Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

Tabel 1.12 Penyederhanaan Persebaran Penduduk Per Kecamatan

Wilayah	2018	2019	2020
Kecamatan Blora	49.033	96.522	98.155
Kecamatan Bogorejo	26.925	24.324	26.240
Kecamatan Cepu	76.587	78.175	79.142
Kecamatan Japah	68.994	37.224	37.759
Kecamatan Jati	50.886	51.923	52.702
Kecamatan Jiken	39.235	39.793	40.428
Kecamatan Randublatung	79.570	81.457	82.771
Kecamatan Kradenan	41.761	42.816	43.497
Kecamatan Kedungtuban	58.867	59.817	61.535
Kecamatan Sambong	28.476	29.070	29.456
Kecamatan Jepon	94.606	65.252	66.193
Kecamatan Banjarejo	64.059	65.454	65.861
Kecamatan Tunjungan	68.994	37.224	37.759
Kecamatan Kunduran	25.501	70.245	71.233
Kecamatan Ngawen	65.047	64.416	65.212
Kecamatan Todanan	36.696	66.837	67.924
Total Jumlah Penduduk	906.380	925.642	938.814

Sumber: RKPD Kabupaten Blora Tahun 2022

Kategori kelompok umur, usia produktif mendominasi penduduk di Kabupaten Blora. Dimana di tahun 2020, total usia penduduk 15-64 tahun memiliki porsi besar yaitu, 71,303% (dari total penduduk tahun 2020 sebesar 884.333 jiwa). Perbandingan relatif merata, berdasar jenis kelamin maupun kelompok umur. Jenis kelamin pria masih memiliki jumlah lebih besar 643 jiwa, yaitu pria sebesar 442.488 jiwa, dan wanita 441.845 jiwa. Tetapi, adanya rasio ketergantungan 40,26%, mengubah pandangan bahwa usia produktif harus menanggung usia non-produktif (usia 0-14 tahun) dan sudah tidak produktif (usia 65-75+) dengan perbandingan 100 dibanding 40 (5:2 dari total jumlah penduduk berdasar usia). Menurut BPS (2010), dalam Sensus Penduduk Tahun 2010, *Dependency Ratio* (rasio ketergantungan) merupakan perbandingan jumlah angkatan belum dan sudah bukan Angkatan Kerja dengan jumlah Angkatan Kerja. Berkorelasi dengan usia dimana usia 0-14 tahun dan usia 65-75+ bukan Angkatan Kerja, sedangkan usia 15-64 tahun Angkatan Kerja. Artinya ada beban berat yang harus ditanggung oleh usia produktif untuk mengurangi rasio ketergantungan tersebut.

Tabel 1.13 Penduduk Berdasar Jenis Kelamin dan Kelompok Usia

Jenis Kelamin	Usia			Rasio Retergantungan
	(0-14)	(15-64)	(65-75+)	
Pria	89.690	315.851	36.947	R: $\frac{\text{Total Usia 0-14 \& 65-75+}}{\text{(Usia 15-64)} \times 100\%}$
Wanita	85.628	314.705	41.512	
Total		884.333		0,40246/40,26%

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

Bonus demografi, bisa menjadi pandangan positif meskipun rasio ketergantungan besar. Usia produktif tahun 2020 memiliki peran mendukung harapan, dimana jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Blora kategori bersekolah 492.071 jiwa. Pendidikan jenjang Perguruan Tinggi memberikan presentase tinggi sebesar 99,02% atau terhadap penduduk angkatan kerja atau produktif. Penentuan berasal dari operasi pembagi jumlah Angkatan Kerja Perguruan Tinggi 33.023 jiwa dengan penduduk bekerja 32.700 jiwa dan pengangguran 323 jiwa. terendah pada Sekolah Menengah Atas sebesar 89,38%, dengan angkatan kerja 114.861 Jiwa, bekerja 102.658 jiwa, dan pengangguran 12.203 jiwa. Selain itu, ditahun sama Kabupaten Blora memiliki penduduk total bekerja 468.013 jiwa, pengangguran 24.058 jiwa, dan bukan angkatan kerja berjumlah 192.285 jiwa. Menunjukkan potensi bonus demografi besar karena jumlah angkatan kerja dalam usia produktifnya besar.

2.1.2. Kondisi Sosial

Realitas masyarakat di Kabupaten Blora mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sesuai letak topografis, dimana di dataran rendah dan perbukitan dengan 40 hingga 500 mdpl. Letak tertinggi wilayah ada di Kecamatan Todanan, dan terendah di Kecamatan Cepu. Selain itu, kondisi iklim di tahun 2016-2020 berada di antara 1.182 – 1.877 mm (rata-rata 113 hari hujan dan 10,52 – 77 km jam kecepatan angin). Pada tahun 2021 dari 946.994 jiwa masyarakat, setidaknya ada

30,26% masyarakat di Kabupaten Blora bermata pencaharian dikategorikan sebagai petani, perkebunan, kehutanan, dan perikanan dan dengan jumlah 286.540 jiwa. Jika dilihat dengan gambaran lingkungan sekitar memang banyak lahan untuk pertanian. Di posisi kedua 23,52%, masyarakat bekerja dalam bidang jasa dan dengan jumlah 222.923 jiwa. Sedangkan di posisi terakhir, masyarakat di Kabupaten Blora bekerja dalam industri pengolahan dengan presentase 0,007% atau 71 jiwa. Pengkategorian ini dilihat dengan jenis pekerjaan yang jelas, meskipun sebenarnya pekerjaan ‘lainya’ memiliki porsi terbesar yaitu, 45,72% atau 432.923 jiwa. Definisi lain pada pekerjaan tidak dapat diketahui dengan jelas, mengingat realitas kondisi dinamis dan tidak dapat di prediksi jangkauan jenis pekerjaan. Meskipun potensi agraris besar karena mayoritas petani, Kabupaten Blora memiliki potensi tambang di setiap wilayah kecamatan. Kecamatan Cepu merupakan wilayah yang berhasil mengembangkan potensi tambang. Sehingga bukan tidak mungkin dominasi petani ini berubah seiring dengan pemaksimalan potensi tambang di wilayah lain.

Tabel 1.14 Penduduk Berdasar Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Presentase	Jumlah
1.	Industri	0,007%	71 Jiwa
2.	Perdagangan mulai dari kecil, besar, dan termasuk di dalamnya	0,5%	4.771 Jiwa
3.	Jasa Kemasyarakatan	23,52%	222.689 Jiwa
4.	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan, dan Perikanan	30,26 %	286.540 Jiwa
5.	Lainya	45,72%	432.923 Jiwa

Sumber: LPPD Kabupaten Blora 2022

2.2. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

Hasil kinerja sebagai pembanding antara target dengan hasil. Sebelumnya hasil kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora saat ini tertuang dalam LKjIP Kabupaten Blora tahun 2022. Selanjutnya, bermuara dalam penilaian SAKIP oleh Kementrian PAN RB yang pada tahun 2020 menyatakan nilai hasil 63,67 atau predikat B (Baik). Hasil kinerja ini dapat diketahui ketika serangkaian proses perencanaan kerja dilakukan (Suryani dan John, 2018:4). Penilaian ini meningkat dari 2 (dua) tahun sebelumnya, yaitu 2019 sebesar 62,22% dan 2018 sebesar 61,22%. Menunjukkan bahwa Kinerja pemerintah Daerah Kabupaten Blora dinilai baik dalam merealisasikan target atas serangkaian perencanaan kerja yang dibuat. Ini juga berarti berhasilnya peningkatan hasil melalui ketercapaian target sudah menjamin realisasi kinerja berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 1. 15 Hasil SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

	Nilai	Kategori
Hasil Evaluasi SAKIP/AKIP Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021	63,67	B (Baik)

Sumber: LKjIP Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021

Indikator kinerja sebagian besar mendapat predikat Memuaskan. Baiknya kinerja Pemerintah Daerah tercantum dalam hasil LKjIP Kabupaten Blora tahun 2021. Dari 22 Indikator Kinerja dan 11 Sasaran Strategis Bupati Kabupaten Blora periode 2017-2021, setidaknya ada 16 dengan kategori Sangat Baik. Hasil kinerja Dimensi IPM oleh Pemerintah Daerah semuanya

mendapat predikat Sangat Baik. Dengan rincian Dimensi Kesehatan, Sasaran 9 memuat UHH dengan capaian kinerja 100,69%. Dimensi Pendidikan, Sasaran 8 memuat HLS dengan capaian kinerja 96,11%, dan RLS dengan capaian kinerja 105,91%. Dimensi Standar Hidup Yang Layak, Sasaran 9 memiliki capaian kinerja 101,94%. Baiknya hasil membuat IKU dan IKK RPJMD tahun 2021-2026 di proyeksikan meningkat disetiap tahunnya. Artinya, secara penilaian Satuan Kerja (Dinas) Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sudah menjalankan aktivitas kinerja daerah dengan baik.

Tetapi, capaian kinerja Pemerintah Daerah tidak menunjukkan hasil signifikan dalam peningkatan capaian IPM. Penjelasan sebelumnya, bahwa IPM Kabupaten Blora masih tergolong rendah dibanding daerah lain di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Perlunya pengukuran kinerja dengan melihat sejauh mana laporan hasil kerja Pemerintah Daerah melalui turunan eksekutif (Dinas) upaya peningkatan capaian IPM Kabupaten Blora. Dinas dipimpin Kepala Dinas mempertanggungjawabkan kinerja kepada Kepala Daerah (Mahsun M., 2018:198). Untuk itu, melalui pengukuran dengan mengetahui laporan hasil realisasi IKU dan IKK akan diketahui seberapa relevan aktivitas kinerja Pemerintah Daerah dalam capaian IPM. Hasil pengukuran juga akan melihat sejauh mana Kepala Daerah atau Bupati bertanggung jawab atas aktivitas kinerja memimpin Kabupaten Blora.

Pengukuran kinerja berarti mengukur sejauh mana laporan kinerja dari Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam pencapaian IPM. Melalui keistimewaan dinas dalam pemenuhan dimensi IPM,

pengetahuan tanggung jawab Dinas terkait diketahui. Meskipun, memang implementasinya makro atau melibatkan seluruh Dinas dan menyeluruh karena bagian dari kinerja Kepala Daerah. Tetapi, penulis hanya menetapkan arah penelitian berdasarkan tetapan fungsi dari Dinas yang terkait pemenuhan IPM Kabupaten Blora, yaitu:

- 1) Dinas Kesehatan
- 2) DPPKB
- 3) Dinas Pendidikan
- 4) DINPERINAKER, dan
- 5) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUPR)

Variabel diperlukan indikator untuk mengukur kinerja. Dinas terkait menjadi Informan dipilih berdasar kesesuaian dimensi IPM. Dimensi Kesehatan, oleh Dinas Kesehatan dan DPPKB. Dimensi Pendidikan, oleh Dinas Pendidikan. Dimensi Standar Hidup Yang Layak, oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan DPUPR. Indikator relevan digunakan untuk mengukur kinerja Dinas terkait dalam penelitian ini, yaitu menurut Mahsun, M. (2018:198) yaitu, (i) Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, (ii) Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, (iii) Struktur Organisasi dan Personalia, (iv) Program Kerja, dan Anggaran. Selanjutnya melihat lebih jauh substansi laporan, penulis menggunakan Indikator Pardoks menurut Van Thiel, S., & Leeuw, F. L., (2002). Melalui pengujian Indikator, akan melihat sejauh mana kinerja sesuai dengan upaya capaian IPM. Sekaligus mendukung jawaban pertanyaan penelitian yang di analisis melalui pembahasan selanjutnya.

2.2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Harapan besar dimulai dari keinginan maju. Perwujudan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora adalah harapan berupa cita-cita yang akan dicapai dimasa mendatang melalui kinerja. Sedangkan, Misi hadir sebagai deskripsi penjelasan dari langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan Visi (Mahsun, M. 2018:2). Tujuan hadir sebagai alasan kinerja dilakukan, dan Sasaran menjadi hasil terukur setelah realisasi Tujuan dilakukan. Semua berkorelasi menciptakan harapan kemajuan Kabupaten Blora. Di dalam Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blora tahun 2016-2021, dimana Visi dan Misi Pemerintah Daerah merupakan proyeksi kinerja Kepala Daerah (Bupati) atas tugasnya memimpin daerah dan Dinas terkait sebagai perantaranya.

Pada tahun 2021, Visi Misi Dinas terkait sudah sesuai dan harus sesuai dengan Visi Misi Bupati Kabupaten Blora. Menurut LKjIP tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Blora sebagai realisasi dari RPJMD Kabupaten Blora periode 2016-2021, Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora tahun 2016-2021, yaitu:

“ Terwujudnya Masyarakat Blora yang Lebih Sejahtera dan Bermartabat.

Sedangkan, Misi tahun 2016-2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Blora perwujudan dari Visi, yaitu:

1. Mewujudkan pemerintah yang efektif bersih KKN, dan demokratis, melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat dan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya daerah yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
3. Meningkatkan iklim kondusif dan kerjasama dengan pihak-pihak berkepentingan serta menciptakan lapangan kerja dan pengembangan inventasi.
4. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik
6. Mewujudkan dan mendorong tersusunnya kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro poor*), *pro job*, *pro growth*, *pro environment* dan *pro gender*.
7. Mewujudkan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Disimpulkan, Visi dan Misi dari 5 (lima) Dinas ini sudah sesuai IKU dan IKK Bupati periode kepemimpinan 2017-2021. Visi Misi Bupati menjadi arah indikator dari Dinas terkait dalam menjamin kesesuaian arah kinerja sebagai turunan dari eksekutif. Selain itu, Dinas terkait juga harus mengupayakan kinerja sesuai peningkatan IPM melalui arah IKU dan IKK yang ada. Meskipun Misi harus disesuaikan fungsi Dinas terkait, tetapi semua akan bermuara pada Visi Bupati Kabupaten Blora. Melihat LKjIP 5 (lima) Dinas terkait, keseluruhan sudah memuat Visi dan Misi Bupati Kabupaten Blora. Terlihat dari aktivitas kinerja Dinas terkait dan RPJMD Kabupaten Blora.

Tujuan dan Sasaran Dinas terkait juga mendukung. Menurut Mahsun M., (2018:4), tujuan sebagai arah rencana dalam meraih misi. Sedangkan, sasaran menjadi penting untuk melihat secara jauh tujuan secara realistis, spesifik, terukur, dapat dicapai, dan dalam waktu tertentu. Tergambar jelas dalam LKjIP masing-masing Dinas terkait yang memuat penjelasan tersebut. Hal ini karena LKjIP Dinas terkait diturunkan dari RPJMD, RKPD, Renja, dan Renstra. Tujuan dan Sasaran dari 5 (lima) Dinas terkait ini berarti sudah mengacu pada rencana kerja Bupati. Artinya, pengupayaan pencapaian IPM Dinas semuanya sudah sesuai yang dibuktikan dengan arah kinerjanya.

Hasil kegiatan wawancara, 5 (lima) Dinas terkait dalam pemenuhan IPM, laporan semuanya sudah sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disesuaikan dengan rencana kerja Bupati Kabupaten Blora. Didukung dalam berkas LKjIP Dinas terkait dan termuat dalam dokumen penting Pemerintah Daerah. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas terkait hasil telaah dokumen dan kegiatan wawancara, sebagai berikut:

Tabel 1. 16 Tujuan dan Sasaran Dinas

No.	Dinas terkait	Tujuan	Sasaran
1.	Dinas Kesehatan	“ Terwujudnya institusi yang mampu menggerakkan pembangunan bidang kesehatan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat dalam rangka meningkatkan status kesehatan, pembiayaan kesehatan dan pelayanan yang bermutu.	1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat 2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit 3. Meningkatnya akses dan mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4. Meningkatnya mutu ketersediaan farmasi 5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan 6. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi 7. Peningkatan pelayanan kesehatan perorangan 8. Meningkatnya kualitas pelayanan publik aparatur Dinas Kesehatan 9. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja aparatur
2.	DPPKB	“ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, sosial dasar, pemberdayaan masyarakat dan lainnya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan terkendalinya jumlah penduduk.
3.	Dinas Pendidikan	1. Meningkatkan partisipasi pendidikan jenjang paud dan akreditasi Lembaga PAUD;	1. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 2. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar

		2. Meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat, angka melek huruf dan Lembaga Pendidikan masyarakat yang terakreditasi; 3. Peningkatan partisipasi pendidikan dasar, menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya angka kelulusan dan rata-rata nilai UN serta peningkatan sarpras; 4. Peningkatan Kompetensi GuruTK; 5. Meningkatkan jumlah pendidik yang berkualifikasi S1/D4.	3. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan
4.	DINPERINAKER	Menentukan kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi tata kerja informasi teknologi yang tepat.	Mewujudkan tenaga yang lebih proporsional, efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksana tugas , lebih terorganisir
5.	DPUPR	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Meningkatnya Lahan Sawah teraliri dalam cakupan DI 3. Meningkatnya pengelolaan tata ruang dan pemanfaatan ruang	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan 2. Meningkatnya panjang jaringan / saluran irigasi kondisi baik 3. Meningkatnya perencanaan dan Pengendalian Ruang

Sumber: LKjIP Tahun 2021 di masing-masing Dinas terkait Kabupaten Blora

2.2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok berkaitan kewajiban Dinas terkait membantu kinerja Bupati dalam mengurus urusan daerah. Sedangkan, Fungsi adalah kekhasan dari Dinas terkait untuk melaksanakan tugas yang diberikan (Mahsun M., 2018:199). Peraturan Bupati (PERBUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Kabupaten Blora sudah mengatur Tugas dan Fungsi Dinas terkait. Penetapan berdasarkan ruang lingkup Dinas terkait dalam mendukung aktivitas kinerja dari Bupati. Dari 5 (lima) Dinas terkait, Tugas Pokok dan Fungsi sudah disesuaikan dengan sesuai kewajiban Peraturan Bupati (PERBUB).

Misalnya DPPKB, memiliki tugas yaitu,

“ Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga serta pembangunan keluarga sesuai Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora.

Hasil kegiatan wawancara, 3 (tiga) Dinas terkait lainnya menunjukkan hasil sama atas kesesuaian. Indikator ini ada pada dokumen Peraturan Bupati (PERBUB) dan LKjIP Dinas terkait. Artinya, sudah ada kejelasan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas terkait urusan Bupati. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Dinas terkait hasil telaah dokumen dan kegiatan wawancara, sebagai berikut:

Tabel 1. 17 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

No.	Dinas terkait	Tugas Pokok	Fungsi
1.	Dinas Kesehatan	“ Berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 56 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.	1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
2.	DPPKB	“ Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Blora pada Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Pertama Tugas Pokok (Pasal 3). Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.	1. Perumusan Perencanaan kebijakan dalam bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga; 2. Pelaksanaan kebijakan bidang bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga; 3. Evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pembangunan Keluarga; dan 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.	Dinas Pendidikan	“ Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Blora dalam Pasal 3 Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pendidikan.	1. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan 4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pendidikan, dan 5. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4.	DINPERINAKER	“ Peraturan Bupati Blora Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam Pasal 3, Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dibidang industri, tenaga kerja, dan transmigrasi.	1. Perumusan kebijakan di bidang industri, tenaga kerja, dan transmigrasi 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang industri, tenaga kerja, dan transmigrasi 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang industri, tenaga kerja, dan transmigrasi.
5.	DPUPR	“ Peraturan Bupati Blora Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.	1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber: Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

2.2.3. Struktur Organisasi dan Personalia

Struktur Organisasi pada Dinas terkait dimaknai tingkatan kepengurusan yang dipimpin seorang Kepala Dinas. Personalia artinya pelaksana SDM untuk mendukung aktivitas kinerja Dinas terkait (Mahsun, M. 2018:199). Tingkatan SDM faktor penting pelaksanaan kinerja Pemerintah Daerah. Tanpa SDM mendukung kegiatan atau program yang dianggarkan Dinas terkait tidak bisa berjalan. Melalui Kepala Dinas, pelaksana sub jabatan dibawahnya akan melaksanakan aktivitas kinerja sesuai dengan apa yang diperintahkan. Struktur organisasi sudah tercantum di dalam laporan Dinas terkait seperti LKjIP Dinas terkait. Terdiri dari bidang-bidang dibawahnya dan dipimpin oleh Kepala Bidang dan pelaksana (personalia). Peraturan Bupati (PERBUB) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas terkait menjadi pedoman susunan Struktur Organisasi dan Personalia. Struktur Organisasi dan Personalia Dinas Pendidikan termuat dalam Peraturan Bupati Blora No. 68 Tahun 2021. Sedangkan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja pada PERBUB Blora No. 74 Tahun 2021. Lebih lanjut, LKjIP Dinas terkait memuat lebih jauh SDM Dinas terkait yang berisi status jabatan hingga lengkap dengan kualifikasi pendidikan. Personalia pada Dinas terkait berkenaan dengan pemberdayaan aktivitas SDM Pegawai untuk mencapai tujuan kinerja (Nurjaman K., (2014). Adapun Struktur Organisasi dan Personalia Dinas terkait hasil kegiatan penelitian dilapangan, sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan

Tabel 1. 18 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

KEPALA DINAS	A. Sekretariat, membawahkan: i. Subbagian Program dan Keuangan, dan ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian. B. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan: i. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan ii. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi, dan iii. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga C. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan: i. Seksi Surveilans dan Imunisasi ii. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular iii. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa D. Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan, membawahkan: i. Seksi Pelayanan Kesehatan ii. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan
---------------------	--

iii. Seksi Sumber Daya Kesehatan

E. UPTD

F. Kelompok Jabatan Fungsional

Tabel 1. 19 Personalia Dinas Kesehatan

Pendidikan Formal	Jumlah Gol.	Golongan														PPPK	
		Gol I		Gol II				Gol III				Gol IV				IX	VII
		I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d		
Sekolah Dasar	2		1	1													
SLTP	1		1														
SLTA	55		1	1	15	1	9	3	11	8	6						
Diploma I	7					1		2		2	2						
Diploma III/Sarjana Muda	504				2	142	166	26	62	34	58						14
Diploma IV	120							12	15	39	29	20	2			3	
S-1/ Sarjana	154							46	23	21	39	22	3				
S-2/Pasca Sarjana	81								48	4	11	17	1				
Total	924 orang		3	2	17	144	175	89	159	108	145	59	6			3	14

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

Tabel 1. 20 Personalia Dinas Kesehatan Berdasarkan Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Non-Formal	
Total	20 orang

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Tabel 1. 21 Struktur Organisasi DPPKB

KEPALA DINAS	
	A. Sekretariat , membawahkan: i. Sub Bagian Program dan Keuangan ii. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	B. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga , membawahkan: i. Seksi Jaminan, Fasilitas Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ii. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB iii. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

C. Pengendalian Penduduk dan Penggerakan , membawahkan:

- i. Seksi Advokasi dan Penggerakan
- ii. Seksi Pengendalian Penduduk
- iii. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader PKB

D. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

***Keterangan:** DPPKB Kabupaten Blora tidak memiliki unit pelaksana kegiatan secara struktural, tetapi memiliki pendamping di setiap Desa/Kelurahan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan atau program yang ada.

Tabel 1. 22 Personalia DPPKB

No	Perangkat Daerah	Jumlah Personil	Kualifikasi Pendidikan									Kualifikasi Gol.								
												PNS GOL.						CPNS GOL.		
			SD	SMP	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	I	II	III		
A.	Jabatan Struktural :	12							2	10				3	9					
1	Kepala Dinas	1								1					1					
2	Sekretaris	1								1					1					
3	Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1								1					1					

4	Bidang Pengendalian Penduduk dan Penggerakan	1							1				1				
5	Sub Bag Program dan Keuangan	1							1				1				
6	Sub Bag Umum & Kepegawaian	1							1					1			
7	Seksi Pengendalian Penduduk	1						1					1				
8	Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader PKB	1							1					1			
9	Seksi Advokasi dan Penggerakan							1					1				
10	Seksi Jaminan, Fasilitas Pelayanan KB dan KR	1							1					1			
11	Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1							1					1			
12	Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB	1							1					1			
13	Pelaksana	14	1		5			7	1			6	8				
14	Jumlah Tenaga Kontrak	68		2	29			17	20								
B.	Kelompok Jabatan Fungsional	33			6			1	26	1			28	5			
	Penyuluh KB	33			6			1	26	1			28	5			
JUMLAH PNS		59	1	2	11			1	34	11			6	39	12		

Sumber: LKjIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

3. Dinas Pendidikan

Tabel 1. 23 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Tahun 2021

KEPALA DINAS	A. Sekretariat, membawahkan: i. Sub bagian Program ii. Sub bagian Keuangan, dan iii. Subbagian Umum dan Kepegawaian. B. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahkan: i. Seksi Pembinaan Sekolah Dasar ii. Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama C. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan: i. Seksi Sarana dan Prasarana dan Riset Sekolah Dasar ii. Seksi Sarana dan Prasarana dan Riset Sekolah Menengah Pertama D. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, membawahkan: i. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini ii. Seksi Pendidikan Masyarakat
---------------------	---

- E. Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan**, membawahkan:
- i. Seksi Administrasi Mutasi Guru dan Tenaga Kependidikan
 - ii. Seksi Disiplin dan Kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan

F. UPTD

G. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2021

Tabel 1. 24 Personalia Dinas Pendidikan

Status	Jumlah Gol.	Golongan														Gender	
		Gol I		Gol II				Gol III				Gol IV					
		I/c	I/d	II/a	II/b	II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	L	P
PNS/CPNS	77		2	1	9	5	3	14	6	4	17	11	4	1		41	35
Kontrak Bupati	1																1
Kontrak Kepala Dinas	66															43	23
Total	144 orang		2	1	9	5	3	14	6	4	17	14	6	4		85	59

Sumber: Hasil Wawancara Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tabel 1. 25 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

KEPALA DINAS	A. Sekretariat , membawahkan: i. Sub bagian Program dan Keuangan, dan ii. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
	B. Bidang Perindustrian
	C. Bidang Penempatan Pelatihan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	D. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosia
	E. UPTD
	F. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 1. 26 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021

KEPALA DINAS	A. Sekretariat, membawahkan: i. Subbagian Program dan Keuangan, dan ii. Subbagian Umum dan Kepegawaian. B. Bidang Bina Marga Wilayah I, membawahkan: i. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah I ii. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah I C. Bidang Bina Marga Wilayah II, membawahkan: i. Seksi Pembangunan Jalan Dan Jembatan Wilayah II ii. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Wilayah II iii. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa D. Bidang Sumber Daya Air Wilayah I, membawahkan: i. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Wilayah I ii. Seksi Pemanfaatan dan Kerjasama Wilayah I
---------------------	--

E. Bidang Sumber Daya Air Wilayah I, membawahkan:

- i. Seksi Pembangunan Dan Rehabilitasi Wilayah II
- ii. Seksi Pemanfaatan dan Kerjasama Wilayah II

F. Bidang Tata Ruang, membawahkan:

- i. Seksi Perencanaan Tata Ruang
- ii. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian

G. UPTD

H. Kelompok Jabatan Fungsional

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2021

***Keterangan:** Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Blora belum atau tidak ada dokumen Personalia yang memuat status jabatan dan pendidikan pegawai.

2.2.4. Program Kerja dan Anggaran

Program adalah pelaksanaan strategi atas perencanaan yang dibuat oleh birokrasi Pemerintah Daerah (Mahsun, M., 2018:42). Sedangkan, Program Kerja memiliki arti pelaksanaan aktivitas kinerja sesuai keistimewaan Dinas terkait yang didukung anggaran (Mahsun, M., (2018:201). Realisasi anggaran terukur atas kuantitas dan kualitas untuk melaksanakan kegiatan atau program disebut kinerja (PP No 8 Tahun 2006). Terukurnya anggaran dan kegiatan atau program akan menunjukkan pencapaian kinerja. Semakin baik realisasi, maka akan semakin dikatakan berhasil. Kegiatan atau program atas anggaran termuat di dalam laporan penting Pemerintah Daerah dan Dinas terkait. Menurut Ibu Nailatul Muayyadad, S. Si. selaku Sub Koor Pembangunan Manusia Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa BAPPEDA Kabupaten Blora, bahwa:

“ Setiap program di Renja OPD harus ada di RKPD, dan Renstra harus ada di RPJM. Seperti kasus Dinas Pertanian ternyata tidak ada di Renstra sama di RPJMD, dan program itu harus hilang. Yang sudah ada bisa tidak dilaksanakan, tapi yang tidak ada tidak boleh tiba tiba ada. Terkait IPM ya, sejauh ini sesuai semua. Mungkin tadi yang tidak ada di Renstra tidak boleh dilaksanakan programnya. Respon BAPPEDA mendorong optimalisasi dari program nya, karena semua yang ada di sana harus dilaksanakan secara optimal. Untuk optimal atau tidaknya kan itu yang membedakan.

Rencana Kerja (Renja) memuat kegiatan atau program dan anggaran wajib untuk tercantum di RKPD Dinas terkait dan RPJMD Kabupaten Blora. Ini sebagai bentuk antisipasi dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah agar terus bersinergi menyesuaikan rencana kerja Bupati Kabupaten Blora. Meskipun terkadang terdapat ketidaksesuaian kegiatan atau program dan anggaran, misalnya Dinas Pertanian dengan kegiatan atau program yang harus dihilangkan atau diganti. Tetapi, hingga sekarang semua sudah menyesuaikan kebutuhan kedalam masing-masing laporan Dinas terkait. BAPPEDA sebatas memberikan dukungan untuk mendorong optimalisasi kegiatan atau program yang dianggarkan Dinas terkait. Wujudnya, melakukan aktivitas evaluasi Tri Wulan dengan meminta laporan Dinas terkait untuk melihat perkembangan upaya peningkatan capaian IPM atas realisasi kegiatan atau program yang dianggarkan.

Anggaran ditetapkan dalam kegiatan atau program harus bertarget relevan. Anggaran, harus menjawab target realistis agar kegiatan atau program yang ada dapat dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai putus ditengah jalan atau tidak berkelanjutan. Dengan ini, Dinas terkait diharapkan menjalankan setiap aktivitas kinerja dapat berjalan maksimal untuk bisa dipertanggung jawabkan kepada Bupati. Melihat lebih dekat Dinas terkait. Dinas Kesehatan, kegiatan atau program yang ada di anggaran sudah sesuai dalam pemenuhan IPM. Jika diperhatikan kembali, setidaknya ada 19 Program Kerja dengan anggaran total sebesar Rp 38.148.082.481 dari pagu Rp 47.671.242.053 dan dengan capaian hasil 80%. Selanjutnya juga ditambah Program Kerja dari masa

jabatan Bupati selama 1 (satu) tahun menjabat yang memuat 4 (empat) Indikator Kerja.

Sesuai Visi dan Misi Bupati Kabupaten Blora Nomor 3, Dinas Kesehatan menjalankan fokus kegiatan atau program pada AKB, AKI, dan penanganan *stunting*. Artinya, kegiatan atau program bagian dari kinerja dan anggaran yang ada sudah sesuai dengan arah kerja Bupati dan termuat dalam dokumen laporan Pemerintah Daerah. Mitra Dinas Kesehatan, itu bisa berasal dari DPPKB, PMD, UPTD PUSKESMAS di masing-masing kecamatan. Hal ini untuk memunculkan iklim kolaborasi antar Dinas terkait dan pelaksana satuan unit kegiatan atau program di tingkat bawah. DPPKB, sudah mengusahakan hasil optimal. Dibuktikan dengan capaian Program Kerja sebesar 88% dengan realisasi anggaran kegiatan atau program Rp 11.912.690.751 dan pagu sebesar Rp 13.642.592.502. DPPKB setidaknya memiliki 13 Program Kerja yang memuat Sub Indikator seperti Program Pengendalian Penduduk, hingga Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejauh ini kegiatan atau program kerja yang dianggarkan sudah relevan dengan rencana kerja Bupati dalam pemenuhan Dimensi Kesehatan IPM.

Dinas Pendidikan, memiliki kegiatan atau program yang mendukung pemenuhan Dimensi Pendidikan IPM yaitu, HLS dan RLS. Setidaknya, ada 6 (enam) Program Kerja dengan 3 (tiga) Sub Indikator Kerja yang di dalamnya memuat program peningkatan kualitas

pendidikan dan pengelolaan agar masyarakat yang sudah berusia sekolah dapat mengenyam pendidikan sebagaimana semestinya. Hasil capaian sebesar 98,78% dengan realisasi anggaran melalui kegiatan atau program Rp 513.144.034.771 dan pagu Rp 522.802.155.596. Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil yang sangat baik ditunjukkan Dinas Pendidikan dalam kinerja kegiatan atau program dan anggaran.

DINPERINAKER, berupaya dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakat Kabupaten Blora agar mampu bersaing di dunia kerja. Program pelatihan, terus dilakukan Dinas terkait. Setidaknya ada 8 (delapan) Program Kerja dengan 3 (tiga) Sub Indikator Kerja yang memuat kegiatan atau program dan anggaran pemenuhan Dimensi Standar Hidup yang Layak IPM. Meskipun tidak langsung berdampak pada peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat guna peningkatan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Tetapi, aktivitas kinerja Dinas terkait sesuai dengan rencana kerja Bupati Kabupaten Blora. Terakhir, DPUPR sudah sangat baik mengusahakan hasil program atau kegiatan dan anggaran yang ada. Dibuktikan dengan hasil capaian kerja sebesar 91,17% dengan realisasi anggaran sebesar Rp 138.578.038.434 dan pagu Rp 151.995.353.160. Ada 11 Program Kerja dengan 4 (empat) Sub Indikator Kerja yang ada sesuai dengan rencana kerja Bupati dan tertuang dalam RKPD maupun RPJMD Kabupaten Blora.

1. Dinas Kesehatan

Tabel 1. 27 Program Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2020

No.	Program Kerja	Capaian	Realisasi	Anggaran
A. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94,7%	141.129.920	149.100.000
2..	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	20,9%	1.353.448.630	6.476.308.980
3.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	99,6%	56.789.920	56.996.000
4.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	99,9%	155.386.840	155.599.200
5.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92,2%	101.458.920	101.452.000
6.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	96,9%	57.460.680	62.297.000
7.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	69,8%	168.511.600	173.933.000
8.	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	0,7%	819.990.960	1.175.199.500
		54,1%	2.020.161.100	2.502.430.000
10.	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	85,4%	449.531.840	830.732.000
11.	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	96,8%	336.255.950	393.692.500
12.	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100%	22.577.916.600	23.318.338.003
13.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	23,8%	319.937.385	1.343.834.800
14.	Pengadaan Obat, Vaksin	93,9%	5.751.320.081	6.124.498.408
15.	Pengadaan Bahan Habis Pakai	98,7%	2.277.353.764	2.306.270.250

16.	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	91%	163.743.000	180.018.000
17.	Operasional Pelayanan Puskesmas	89,4%	6.874.618.500	7.685.700.000
18.	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	95%	518.915.671	546.282.000
19.	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	23,8%	319.937.385	1.343.834.800
	Rata-Rata Total	80%	38.148.082.481	47.671.242.053

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

Tabel 1. 28 Capaian Kegiatan Periode Satu Tahun Bupati Kabupaten Blora Tahun 2021

No.	Program Kerja	Realisasi	Anggaran
1.	Mandeng Sedulur Meteng Percepatan Penurunan Stunting	724.673.250	906.990.000
2.	Penurunan Angka Kematian Bayi, Ibu dan Anak		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	141.129.920	149.100.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	75.000.000	75.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	56.789.920	56.996.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	155.386.840	155.599.200
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	101.458.920	101.452.000
3.	Fasilitasi Sarana Prasarana Kesehatan		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	13.778.712.100	13.842.024.022
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		

	Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas		
	Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.165.750.500	2.347.797.994
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	812.316.000	902.291.000
	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)		
4.	Peningkatan Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan (Posyandu, Pusat Kesehatan Desa, Pustu, Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah) Serta Peningkatan Status Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	319.937.385	1.470.459.000
	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota		

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

***Keterangan:** Program Kerja tambahan berasal dari kepemimpinan baru Bupati periode 2021-2024.

2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB)

Tabel 1. 29 Program Kerja dan Anggaran DPPKB Tahun 2020

No.	Program Kerja	Capaian	Realisasi	Anggaran
A, Program Pengendalian Penduduk				
1.	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100%	10.000.000	10.000.000
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	100%	14.990.000	15.000.000
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	100%	10.061.000	10.095.000
2.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	100%	3.880.000	3.880.000
	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	100%	29.890.000	30.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	100%	15.000.000	15.000.000
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100%	6.000.000	6.000.000
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	5.000.000	5.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan KKBPK	99%	6.899.000	7.000.000

B. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
3.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal			
	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100%	15.000.000	15.000.000
	Komunikasi, informasi dan Edukasi(KIE) program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	96%	11.568.000	12.000.000
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	51%	198.924.658	386.910.502
	Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	100%	11.963.000	12.000.000
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	98%	1.131.826.717	1.152.768.000
4.	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	98%	9.792.400	10.000.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%	2.659.750.000	2.660.000.000
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
5.	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	89%	91.234.307	101.948.000
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	66%	1.015.028.696	1.542.913.000
	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	99%	1.050.942.000	1.059.842.000

	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	99%	14.950.000	15.000.000
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	62.000.000	62.000.000
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	90%	28.023.000	31.000.000
6.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB			
	Penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	95%	8.612.000	9.085.000
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK dan Kampung KB	100%	790.528.000	790.528.000
C. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)				
7.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	98%	224.400.000	229.500.000
	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	97%	9.661.000	10.000.000
	Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	593.520.000	594.800.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan			

	Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100%	14.971.000	15.000.000
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga).	98%	35.335.000	36.000.000
8.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	99%	14.865.000	15.000.000
D. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
9.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	2.000.000	2.000.000
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	2.000.000	2.000.000
10.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	75%	2.705.176.814	3.600.000.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	9.600.000	9.600.000
11.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	4.000.000	4.000.000

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100%	12.000.000	12.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99%	2.400.000	2.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100%	14.880.000	14.900.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	10.293.000	10.293.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80%	5.145.000	6.620.000
	Penyediaan Bahan/Material	100%	33.670.000	33.670.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	66.091.243	66.100.000
12.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	98%	4.887.500	5.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80%	66.262.750	82.400.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	95%	786.777.592	825.340.000
13.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%	53.490.394	53.500.000
	Pemeliharaan Mebel	100%	5.000.000	5.000.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	16.480.000	16.480.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%	10.000.000	10.000.000
Rata-Rata Total		88%	11.912.690.751	13.642.592.502

Sumber: LKjIP DPPKB Kabupaten Blora Tahun 2021

3. Dinas Pendidikan

Tabel 1. 30 Program Kerja dan Anggaran Dinas Pendidikan Tahun 2021

No.	Program Kerja	Capaian	Realisasi	Anggaran
A. Meningkatnya kualitas Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat				
1.	Program Pengelolaan Pendidikan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	93,15%	18.287.246.236	19.632.647.356
B. Meningkatnya kualitas pelayanan Pendidikan Dasar				
2.	Program Pengelolaan Pendidikan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	99,90%	95.761.779.712	95.862.244.820
3.	Program Pengelolaan Pendidikan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	108,71%	42.761.925.625	39.335.472.576
4.	Program Pengembangan Kurikulum : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	98,58%	49.014.000	49.722.000
C. Meningkatnya kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan				
5.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	40.125.000	40.125.000
6.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	2.000.000	2.000.000
	Rata-Rata Total	98,78%	513.144.034.771	522.802.155.596

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora Tahun 2021

4. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tabel 1. 31 Program Kerja dan Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2020

No.	Program Kerja	Capaian	Realisasi	Anggaran
A. Meningkatnya penempatan tenaga kerja				
1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	93,77%	518.537.600	553.000.000
2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	98,95%	34.632.080	35.000.000
3.	Program Hubungan Industrial	96,62%	50.235.000	52.000.000
4.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	98,01%	9.801.315	10.000.000
B. Meningkatnya Jumlah Industri				
5.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	71,19%	380.862.938	535.000.000
6.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	46,69%	3.735.000	8.000.000
7.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71,81%	313.814.000	437.000.000
C. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora				
8.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	88,31%%	4.271.057.683	4.836.181.250
	Rata-Rata Total	86,34%	5.582.676.536	6.466.181.250

Sumber: LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora Tahun 2021

5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Tabel 1. 32 Program Kerja dan Anggaran DPUPR Tahun 2020

No.	Program Kerja	Capaian	Realisasi	Anggaran
A.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	91.36%	105.086.904.923	115.030.296.000
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	91.36%	105.086.904.923	115.030.296.000
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan	95.73%	2.958.036.115	3.090.000.000
	Pemeliharaan Berkala Jalan	91.45%	1.646.113.000	1.800.000.000
	Pemeliharaan Rutin Jalan	94.17%	4.058.645.708	4.310.000.000
	Pembangunan Jembatan	93.80%	1.735.259.900	1.850.000.000
	Rekonstruksi Jalan	91.03%	93.784.878.100	103.030.296.000
	Rehabilitasi Jalan	95.15%	903.972.100	950.000.000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	90.67%	22.584.235.910	24.523.289.000
2.	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	90.67%	13.663.813.410	15.069.448.400
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	97.57%	497.615.710	510.000.000
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	89.32%	10.991.751.000	12.306.114.000
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	96.50%	2.174.446.700	2.253.334.400
3.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	94.36%	8.920.422.500	9.453.840.600
	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air lainnya	97.23%	2.243.349.350	2.307.175.000
	Rehabilitasi Tanggul Sungai	93.82%	6.520.752.150	6.950.000.000

	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	79.49%	156.321.000	196.665.600
C.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	57.07%	241.422.500	423.000.000
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	69.97%	128.048.500	183.000.000
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	63.91%	53.048.500	83.000.000
	Koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana tata ruang lintas kabupaten/kota	75.00%	75.000.000	100.000.000
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	62.31%	62.307.000	100.000.000
	Pengelolaan Sistem Informasi Tata Ruang	62.31%	62.307.000	100.000.000
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	36.48%	51.067.000	140.000.000
	Koordinasi dan fasilitas pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten/kota	36.48%	51.067.000	140.000.000
D.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	88.74%	10.665.475.101	12.018.768.160
7.	Perencanaan dan Evaluasi Kerja Perangkat Daerah	32.50%	6.500.000	20.000.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	32.50%	1.625.000	5.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	32.50%	1.625.000	5,000,000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.50%	1.625.000	5.000.000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32.50%	1.625.000	5.000.000
8.	Administrasi keuangan Perangkat Daerah	90.07%	8.079.599.594	8.970.000.000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	90.11%	8.077.974.594	8.965.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.50%	1.625.000	5.000.000

9.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.41%	603.400.851	741.168.160
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	12.000.000	12.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.38%	248.910.000	253.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.75%	44.848.000	60.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	73.59%	19.919.623	2.068.160
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	53.28%	9,590,000	18.000.000
	Penyediaan Bahan/Material	99.69%	99.693.320	100.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.13%	168.439.908	271.100.000
10.	Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	84.38%	1.520.104.706	1.801.600.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	2.100.000	2.100.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	51.33%	136.847.032	266.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	90.10%	1.381.157.674	1.532.900.000
11.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.80%	455.869.950	486.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	88.97%	32.920.300	37.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	74.27%	64.616.050	87.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	99.26%	260.068600	262.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.27%	98.265.000	100.000.000
Rata-Rata Total		91.17%	138.578.038.434	151.995.353.160

Sumber: LKjIP DPUPR Kabupaten Blora Tahun 2021

2.2.5. Hasil Kinerja

Kinerja pencapaian Dimensi Kesehatan IPM dinilai baik. Keberhasilan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2021 yang berkategori Tinggi (penyerapan anggaran 80%) menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Tingginya hasil ini karena ketersediaan Pagu anggaran dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Dinas terkait disetiap upaya peningkatan IPM melalui kegiatan atau program.

Tabel 1. 33 Hasil Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan	Capaian	Realisasi	Anggaran
	80%	38.148.082.481	47.671.242.053

Sumber: LKjIP Dinas Kesehatan Tahun 2021

Hasil evaluasi SAKIP Dinas Kesehatan mengalami penurunan yaitu, penilaian SAKIP tahun 2021 sebesar 71,36% kategori BB (Baik Sekali). Sedangkan ditahun 2020, hasilnya berkategori A (Memuaskan). Tetapi, ketercapaian kinerja juga masih dapat dikatakan baik. Tidak terpenuhinya target kinerja mengakibatkan hasil evaluasi SAKIP menurun. Jika dilihat dari komponen nilai, penilaian tertinggi ada di Perencanaan Kerja dengan presentasi 22,50% atau ketercapaian 75% dari bobot nilai 30%. Di ikuti Pelaporan Kerja 73% dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 70%. Beliau juga menambahkan adanya *cash cading* dan *cutting cross* atau penurunan kinerja Dinas Kesehatan yang mempengaruhi hasil evaluasi ini menurun ditahun 2021.

Tabel 1. 34 Hasil SAKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021

Komponen Nilai	Nilai	Bobot Nilai
Perencanaan Kinerja	22,50%	30%
Pengukuran Kinerja	20,40%	30%
Pelaporan Kinerja	10,95%	15%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	17,50%	25%
Hasil Evaluasi SAKIP	71,36%	100%

Sumber: LHE SAKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Blora

Keberhasilan kinerja karena pemanfaatan anggaran baik. Pencapaian kinerja DPPKB dinilai berhasil dengan hasil capaian Memuaskan (penyerapan anggaran 88%). Hasil capaian berasal dari perbandingan realisasi anggaran yaitu, Rp 11.912.690.751 dengan Pagu penganggaran DPPKB sebesar Rp 13.642.592.502 pada tahun 2021.

Tabel 1. 35 Hasil Capaian Kinerja DPPKB Tahun 2021

	Capaian	Realisasi	Anggaran
Capaian Kinerja DPPKB	88%	11.912.690.751	13.642.592.502

Sumber: LKjIP DPPKB Tahun 2021

DPPKB, juga menunjukkan keberhasilan hasil evaluasi SAKIP. Target dan Sasaran yang direncanakan dalam kegiatan atau program kerja dapat direalisasikan dengan hasil baik. Penghargaan juga didapatkan DPPKB, baik dari Pemprov Jawa tengah atau Pemerintah Pusat. Artinya, hasil kinerja dari DPPKB Kabupaten Blora dinilai dapat dan mampu untuk pemenuhan pencapaian Dimensi Kesehatan IPM Kabupaten Blora. Adapun penghargaan DPPKB ditahun 2020 yaitu, sebagai berikut:

- a. Pelaksana Terbaik 1 Kesatuan Gerakan PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- b. Juara Harapan 1 Pelayanan KB Serentak dalam rangka HARGANAS Tingkat Provinsi Jawa Tengah.
- c. Juara 2 Lomba BABINSA Penggerak Program Bangga Kencana Tingkat Provinsi Jawa Tengah

Meskipun dinilai berhasil, fokus kinerja menjadi perhatian DPPKB.

Adanya target *New Zero Stunting* sebagai pendukung pencapaian UHH

Dimensi Kesehatan IPM menjadi fokus tujuan kinerja DPPKB.

Kinerja capaian Dimensi Pendidikan, dikatakan baik juga. Dimana tingginya hasil kinerja kegiatan atau program didukung di dukung besarnya anggaran. Selain itu, pencapaian kinerja Dinas Pendidikan dinilai sangat berhasil dengan kategori Memuaskan (penyerapan anggaran 98,78%). Perbandingan Pagu anggaran atas rencana sebesar Rp 522.802.155.596 dapat di realisasikan mendekati sempurna oleh Dinas Pendidikan dalam upaya mendukung pemenuhan Dimensi Pendidikan IPM, yaitu Rp 513.144.034.771.

Tabel 1. 36 Hasil Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2021

	Capaian	Realisasi	Anggaran
Capaian Kinerja Dinas Pendidikan	98,78%	513.144.034.771	522.802.155.596

Sumber: LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2021

Juga berarti, kegiatan atau program yang telah ditergetkan oleh Dinas Pendidikan guna mendukung capaian Dimensi Pendidikan IPM berhasil dilaksanakan. Hasil evaluasi SAKIP/AKIP Dinas Pendidikan juga berketgori Baik yaitu, dengan capaian sebesar 68,18% tahun 2021.

Penilaian tertinggi pada komponen nilai ada di Pengukuran Kinerja dengan presentase 80% atau ketercapaian 18,75% dari bobot nilai 30% evaluasi SAKIP. Disusul oleh Evaluasi Internal 78,4%, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Sasaran 75%, hingga Perencanaan Kerja sebesar 73,4%. Artinya, kinerja anggaran dan akuntabilitas berhasil.

Tabel 1. 37 Hasil SAKIP Dinas Pendidikan Tahun 2021

Komponen Nilai	Nilai	Bobot Nilai
Perencanaan Kinerja	22,02%	30%
Pengukuran Kinerja	18,75%	25%
Pelaporan Kinerja	12,08%	15%
Evaluasi Internal	7,84%	10%
Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi	7,50%	20%
Hasil Evaluasi SAKIP	68,18%	100%

Sumber: SAKIP Dinas Pendidikan Kabupaten Blora

Terakhir Dimensi Standar Hidup yang Layak, juga nilai berhasil. Meskipun, peningkatan hasil melalui fokus kinerja pada target kegiatan atau program perlu dilakukan. Seperti hasil kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapatkan hasil capaian berkategori Memuaskan (penyerapan anggaran 86,34%). Pencapaian didukung oleh berhasilnya target dari Pagu anggaran terserap sebesar Rp 6.466.181.250 dengan realisasi anggaran Rp 5.582.676.536.

Tabel 1. 38 Hasil Capaian Kinerja Dinas Tahun 2021

	Capaian	Realisasi	Anggaran
Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	86,34%	5.582.676.536	6.466.181.250

Sumber: LKjIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2021

Perhatian akan target Tujuan dan Sasaran membawa keberhasilan Dinas terkait mempertanggung jawabkan hasil kinerja. Menurut Ibu Eny Kurniasih, S.E., MM., selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, bahwa:

“ Iya kalau SAKIP tahun 2021 kebetulan Dinperinaker telah mencapai nilai BB dengan nilai angka 73,31%, ini penilaian dari Inspektorat kaitanya dengan revormasi birokrasi dan SAKIP di Kabupaten Blora khususnya di Dinperinaker. Jadi nilai 73,31 menunjukan Sangat Baik, sesuai dengan Tujuan dan Sasaran ditargetkan di Renstranya Dinperinaker.

Hasil evaluasi SAKIP/AKIP Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar 73,31% atau berkategori Baik di tahun 2021. Keberhasilan kinerja Dinas terkait ini secara tidak langsung juga akan mendukung pemenuhan Dimensi Standar Hidup yang Layak IPM. Terutama dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Blora.

Ketersediaan anggaran menjadi pemantik hasil kinerja. Hasil kinerja DPUPR juga berkategori Memuaskan (penyerapan anggaran 91,17%). Ketersediaan anggaran besar berkorelasi dengan hasil realisasi anggaran Rp 138.578.038.434 dari Pagu anggaran yang direncanakan sebesar Rp 151.995.353.160. Pencapaian kinerja sebagai dukungan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas terkait. Ini sebagai upaya peningkatan infrastruktur yang nantinya secara tidak langsung berdampak pada perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan rill per kapita masyarakat di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 39 Hasil Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2021

Capaian Kinerja DPUPR	Capaian	Realisasi	Anggaran
	91.17%	138.578.038.434	151.995.353.160

Sumber: LKjIP DPUPR Tahun 2021

Hasil evaluasi SAKIP/AKIP DPUPR tahun 2021, mendapat hasil sebesar 69,01% atau berkategori Baik. Komponen penyusunan penilaian terbesar porsinya pada pencapaian Perencanaan Kerja sebesar 77% atau mendapat hasil 23,10% dari bobot nilai 30%. Sedangkan posisi selanjutnya, Pengukuran Kerja 72%, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 60%. Menurut Bapak Ir. Tedi Rindaryo Widodo selaku Sekretaris DPUPR Kabupaten Blora, bahwa:

“ Capaian nilai SAKIP adalah B kategorinya Baik, dengan nilai 69,01. Harapannya SAKIP nya sudah sesuai, tetapi untuk mencapai pendapatan per kapita masih belum. Mungkin realisasi target masih jauh dari target karena masih beberapa faktor dilapangan.

Baiknya hasil kinerja dinilai belum mencapai tujuan Dinas. Menyiratkan pernyataan Bapak Tedi, memang hasil tersebut baik dan diharapkan tujuan Dinas terkait berhasil. Tetapi, memang masih belum berkorelasi penuh mendukung capaian pendapatan secara langsung.

Tabel 1. 40 Hasil SAKIP DPUPR Tahun 2021

Komponen Nilai	Nilai	Bobot Nilai
Perencanaan Kinerja	23,10%	30%
Pengukuran Kinerja	21,60%	30%
Pelaporan Kinerja	9,30%	15%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,00%	25%
Hasil Evaluasi SAKIP	69,01%	100%

Sumber: LHE SAKIP DPUPR Kabupaten Blora

2.2.6. Kesesuaian Dampak

Kesesuaian Dimensi Kesehatan, dalam hasil kinerja Dinas dinilai berdampak. Berhasilnya capaian kinerja pada Sasaran 9 Indikator Kinerja UHH yaitu, 100,69%. Ditambah realisasi anggaran Dinas Kesehatan yang berkategori Tinggi (80%), dan DPPKB berkategori Memuaskan (88%). Ini memberikan pemahaman baiknya kinerja Dinas terkait dalam capaian UHH. Jika dilihat pencapaian UHH Kabupaten Blora, tercatat ada peningkatan sebesar 0,10 poin di tahun 2021 (BPS Jawa Tengah, 2021). Artinya, hasil kinerja baik memang berdampak pada peningkatan capaian UHH di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 41 Peningkatan Capaian UHH Kabupaten Blora

Periode Tahun	Dimensi Kesehatan (UHH)
2021	74,51
2020	74,41
Peningkatan	0,10 poin

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Dampak peningkatan UHH tidak terlepas dari pencapaian target bermanfaat bagi masyarakat. Aktivitas kinerja Dinas terkait melalui kegiatan atau program tidak hanya sebatas pengisian administratif atau teks saja. Tetapi, langsung terjun ke lapangan dan berharap agar kegiatan atau program langsung dirasakan oleh masyarakat. Sehingga, ketika perhitungan capaian bisa terhitung maksimal. Menurut Ibu Suprpti, SH. selaku Subkor Advokasi dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Blora, bahwa:

“ Kalau targetnya sudah terpenuhi otomatis harusnya iya (berdampak) karena kita tidak kerja tidak hanya teks aja tetapi juga ke lapangankan kaya tadi kegiatan melalui kader yang harus turun kelapangan seperti penyuluhan, pendampingan, orientasi kemana mana ke Poktan, ke masyarakatnya langsung ke PIK R nya ke kelompok BKBKR nya langsung kan gitu GENRE nya juga dan itu langsung, benar otomatis harusnya berdampak. Intervensi Stunting di beberapa (wilayah) meskipun tidak meunutup kemungkinan muncul baru, tapi di beberapa daerah rutin audit *stunting* (dinyatakan) tetap turun. Target tahun 2024 kan 14% dari tahun ini yang masih 21%, harus turun agar target *New Zero Stunting* (tidak ada stunting-stunting baru). Semua sudah menyentuh kesemua lini, tinggal pelaksanaan dilapangan itu, kan kendalanya disitu.

Contoh kegiatan penanganan *stunting* oleh DPPKB. Kegiatan memiliki target penyuluhan dan pendampingan yang mengharuskan bertemu, agar dampak langsung objek kegiatan atau program langsung dirasakan. Selain itu, intervensi langsung dan audit berkala bertujuan mengentaskan *stunting* hingga *New Zero Stunting* juga dilakukan.

Ketercapaian UHH, sejauh ini juga menjadi target prioritas kinerja Dinas Kesehatan berkaitan dampak. Dimana peningkatan capaian UHH indikator Dimensi Kesehatan IPM terus dimaksimalkan. Meskipun secara tidak langsung termaksud dalam kegiatan atau program. Menurut Iwan Budhi Prasetyo, SE selaku Staf Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Jadi gini, disini kita lihat indikatornya. Misal indikatornya Penyemprotan Fogging target kita 100, otomatis realisasinya 100. Pokok masalahnya ada di indikator, jadi indikatornya apa kalau seperti presentase ini 100 semua, penanganan langsung soalnya Dinas Kesehatan. Kita sebagai faktor pendukung, UHH (Usia Harapan Hidup) itu missal targetnya 73, jadi dibawah itu ada faktor pendukung indikatornya. Misal, UHH kan ada namanya Usia

Lanjut, jadi kita akomodir dan prefentif saja. Kita evaluasi hasil kinerja Dinas Kesehatan keseluruhan program atau kegiatan (dan) sub kegiatan. Totalnya berapa, realisasinya berapa, untuk tahun kedepan paling tidak kita akan kerja lebih baik, jangan sampai dibawah tahun ini.

Terlihat aktivitas kinerja Dinas Kesehatan, sebagai aktor pendukung pemenuhan UHH berusaha untuk merealisasikan kinerja sesuai target dan berdampak kepada masyarakat. Kegiatan atau program yang dilaksanakan sebagai bentuk akomodir dan prefentif atas indikator pendukung UHH. Misalnya, pada pembahasan sebelumnya Program *Stunting*, Gizi Buruk, dan Kematian Ibu Hamil. Bapak Budhi juga mengungkapkan, di setiap tahun Dinas Kesehatan selalu berusaha menjadi lebih baik dan berusaha agar kinerja tidak menurun.

Pelaksana kebijakan Dinas terkait juga mengatakan hasil kinerja berdampak. Adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) oleh UPTD PUSKESMAS dengan penetapan target disesuaikan kebijakan Dinas terkait dan IKU Bupati menunjukkan realisasi baik. Menurut Ibu dr. Nur Istifah selaku Kepala UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa:

“ Target dampak sudah ada pada hasil SPM yang sejauh ini sudah dilaksanakan dan berdampak. Ada sekitar 12 SMP yang sudah tercapai sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati (file terlampir). Benar, program banyak sesuai arahan Dinas Kesehatan atas Peraturan Menteri yang harus kita laksanakan. Memang SDM masih kurang, misalnya pegawai merangkap. Bidan menjadi Bendahara Aset dan Perawat menangani aset bendahara barang.

UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen, dimana setidaknya ada 12 SPM berpedoman dari IKU Bupati yang sudah dilaksanakan.

Kebijakan pelayanan diarahkan Dinas Kesehatan direalisasikan dengan kategori baik. Pelayanan capaian UHH pada Dimensi Kesehatan IPM juga tergambar, dimana Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai Standar Pelayanan Antenatal sebesar 83,04%, disusul Pelayanan Kesehatan Balita 78,2%, dan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 69,01%. Artinya, pelaksana kegiatan atau program Dinas terkait juga sudah mengupayakan capaian berdampak dengan tetapan target mendukung peningkatan UHH di Kabupaten Blora. Ini terlihat pada contoh pelaksanaan pencapaian SPM sesuai IKU Bupati Kabupaten Blora pada pelaksanaan kebijakan di UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen.

**Tabel 1. 42 Capaian SPM Bulan Oktober 2022 UPTD PUSKESMAS
Kecamatan Ngawen**

No.	Indikator	Sasaran	Realisasi	Hasil
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Pelayanan Antenatal	560	390	83,04%
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	534	369	69,10%
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	509	370	72,69%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	2036	2003	78,2%
5.	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dokter	2279	1380	60,6%
6.	Pelayanan Kesehatan Usi Produktif	26995	20724	76,75%
7.	Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	4182	3254	77,8%
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11852	2454	20,7%
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	452	487	89,9%
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	104	119	111,5%
11.	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	188	188	100%
12.	Pelayanan Kesehatan Orang beresiko terinfeksi HIV	285	251	88,1%

Sumber: Hasil Wawancara UPTD PUSKESMAS Ngawen

Pelimpahan kebijakan Dinas terkait kepada UPTD pelaksana sudah searah mendukung capaian UHH. Kegiatan atau program dari Dinas Kesehatan yang di jalankan oleh UPTD PUSKESMAS berupaya berkontribusi dalam pencapaian UHH Kabupaten Blora. Menurut Ibu dr. Nur Istifah selaku Kepala UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa:

“ Ada beberapa program atau kegiatan yang dilakukan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) PUSKESMAS Kecamatan Ngawen dengan Dinas Kesehatan, yaitu: a. KIA berkaitan dengan upaya penurunan angka kematian Ibu dan Bayi, b. Gizi berkaitan dengan penanganan stunting, c. P2TM berkaitan dengan penanganan penyakit tidak menular, d. P3M berkaitan dengan penanganan penyakit menular. Berkontribusi banyak dalam kegiatan realisasi program atau sebagai pelaksana kebijakan dari Dinas Kesehatan. Iya, berorientasi atas pemenuhan dimensi IPM Usia Harapan Lama Hidup (UHH).

Guna mendukung aktivitas kinerja Dinas Kesehatan, ketersediaan SDM maupun penganggaran juga sudah berpedoman peraturan. Menurut Ibu dr. Nur Istifah selaku Kepala UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa:

“ Sudah sesuai dan dijalankan dengan semestinya. Sudah, dibantu dengan kita. Kita sudah punya karyawan dengan uraian Tupoksi disamping dengan tugas pokok ada yang namanya tugas terintegrasi (tugas pembantuan). Misalnya, Bidan selain profesi dan kompetensi dan menjalankan tugasnya missal periksa kehamilan juga merangkap sebagai bendahara ataupun bendahara aset. Sudah sesuai dan di dukung dengan struktur organisasi PUSKESMAS melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2019. Cukup, menjawab tantangan pemenuhan UHH. kita kan ada PUD kita juga mendapat anggaran dari pusat yaitu, BOK (Badan Operasional Kesehatan), APBD, dan dengan BLUD (Badan Umum Pelayanan Daerah) pendapatan dikelola sendiri oleh PUSKESMAS jadi lebih leluasa mendukung dengan merealisasikan program atau kegiatan dari Dinas Kesehatan.

Koordinasi antar Dinas terkait diusahakan untuk mendukung kegiatan atau program berdampak peningkatan UHH. Hal ini selaras menurut Ibu Suprpti, SH. selaku Subkor Advokasi dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Blora, bahwa:

“ Derajat kesehatan memang menyumbang dari hampir 90% mungkin ya Usia Harapan Hidup kan dari derajat kesehatannya. Kaya tadi Usia Harapan Hidup kan tidak ini saja, kompleksitas permasalahan itu kan tidak hanya dari derajat kesehatan saja. Mungkin permasalahan lain juga turut menyumbang. Meskipun harus diakui derajat kesehatan, orang sehat kan otomatis kan harapan hidupnya lebih besar. Tapi kan *stunting* tadi tidak merasa sakit, jadi semua permasalahan kompleks. Seperti konvergensi *stunting* tidak hanya disana, tetapi melibatkan semua OPD yang terkait. Mungkin DINSOS P3A terkait data keluarga tidak mampu, otomatis kan beresiko *stunting*. Kemudian PMD (Pembangunan Masyarakat Desa) itu juga terkait, ada dana desa untuk mencukupi Dana PMT (Pemberian Makanan Tambahan) yang di Posyandu Posyandu itu kan. DALDUK KB terkait pencegahannya, otomatis beresiko *stunting* ada pendampingan CATIN (Calon Pengantin). Seharusnya kerja sama, berkolaborasi, dan bersinergi. Tetapi sejauh ini yang sudah dilaksanakan sudah dapat bersinergi, seperti ada Tim Monev Konvergensi *Stunting* dalam ranah fungsinya. Seperti yang sudah dikatakan sesuai dengan fungsinya, tinggal semua tadi yang menerima sasarannya, bisa menerima atau tidak. Tinggal kadernya dilapangan bisa menyampaikan sesuai yang kita harapkan atau tidak, berarti SDM dilapangan. Kalau kita wara-wara (pengumuman) penekanannya di kader, kita menggerakan masyarakatnya di kader selain datang sendiri.

Penanganan konvergensi *stunting* bentuk program yang tidak bisa dilaksanakan satu Dinas terkait saja. DPPKB berupaya untuk menjalin koordinasi dengan semua Dinas, misalnya DINSOS P3A terkait data masyarakat tidak mampu, PMD, dan Dinas lainnya. Selain itu, Ibu Suprpti juga mengungkapkan peran pendamping juga menjadi penting untuk keberhasilan merealisasikan program kepada masyarakat.

Keberhasilan kinerja Dinas terkait dalam pemenuhan UHH memang berdampak. Tetapi, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang menghambat aktivitas kinerja capaian UHH.. Hambatan terbesar pencapaian UHH pada Dimensi Kesehatan IPM terletak pada SDM pelaksana dan Anggaran. Dalam aktivitas mendukung kegiatan atau program Dinas terkait, kualitas SDM pelaksana masih perlu ditingkatkan. Menurut Bapak Iwan Budhi Prasetyo, SE selaku Staf Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Jadi yang menghambat kita ya Mitra (PUSKESMAS) sendiri, seharusnya kita bekerja lebih cepat, Mitra kita banyak kegiatan di desa dia capek besok baru input, kaya gitu. Misalnya, kita sudah ngirim bit.ly Mitra kita PUSKESMAN tinggal ngisi bilang belum selesai, belum selesai. Laporan, ya tadi laporan kematian ibu berapa, data *stunting* berapa, kan seperti itu. Biasanya saya langsung kesana menemui Si A Si B, ini saya kan harus selesai hari ini, yang belum masuk saya telfon hari ini. Jadi kita sudah buat inovasi SIMPULS (Sistem Informasi PUSKESMAS), jadi kalau SIMPULS nya ngga jalan, kita ga bisa apa apa. Itu seharusnya komplit, setiap kita ngelihat mesti *zonk* tidak ada. Ditahun 2023 ada review lagi SIMPULS, nanti diundang 26 PUSKESMAS kita sosialisasikan lagi ini update versi terbaru. Mereka kalau dikasi sosialisasi kurang, jadi dikasi pengertian ini ini caranya seperti ini jelas disini, suma kalau sampai rumah telfon lagi, saya sering seperti itu.

SDM pelaksana kegiatan atau program dalam penginputan data terkesan lamban dengan alasan beban kerja. Misalnya saja pelaporan jumlah kematian Ibu, kasus *stunting*, dan sebagainya. Selain itu, kurangnya perhatian pelaksana dan terkesan menyepelekan informasi

juga menjadi hambatan Dinas terkait dalam mengupayakan kegiatan atau program UHH berdampak bagi masyarakat. Menurut Ibu dr. Nur Istifah selaku Kepala UPTD PUSKESMAS Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bahwa:

“ Memang SDM masih kurang, misalnya pegawai merangkap. Bidan menjadi Bendahara Aset dan Perawat menangani aset bendahara barang.

Permasalahan menjadi penghambat kinerja berdampak juga terletak pada kurangnya SDM pelaksana. Beliau menyampaikan banyak pegawai merangkap jabatan. Misalnya, Bidan menjadi Bendahara Aset dan Perawat membantu Perbendaharaan Barang. Hal semacam ini menghambat realisasi kegiatan atau program Dinas terkait yang berdampak bagi capaian UHH di Kabupaten Blora.

Anggaran terbatas, perlu ditingkatkan. Dinas terkait lainnya diharapkan bisa saling membantu, baik sosialisasi kegiatan atau program agar aktivitas kinerja saling bersinergi dan dirasakan masyarakat. Seperti Program GERMAS, peningkatan derajat kesehatan yang perlu dukungan dari Dinas lain. Menurut Ibu Suprapti, SH. selaku Subkor Advokasi dan Penggerakan DPPKB Kabupaten Blora, bahwa:

“ Permasalahan realisasi program semua tertampung di anggaran. Perlunya dukungan tidak hanya dari satu dinas ini (Dinas Kesehatan dan DPPKB) saja, tetapi bersama-sama melalui program yang sudah berjalan. Setiap OPD sekarang harus mempublikasikan namanya GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) untuk mendukung (aspek) derajat kesehatan, tidak melulu di DKK tetapi menjadi kewajiban setiap OPD.

Dimensi Pendidikan, dalam realisasi capaian kinerja Dinas terkait belum seluruhnya relevan, tetapi sudah berdampak . Kondisi ini berasal dari permasalahan diluar kegiatan atau program sesuai IKU Bupati Kabupaten Blora. Meskipun, hasil pencapaian kinerja Dimensi Pendidikan pada Sasaran 8 dengan HLS sebesar 96,11% dan RLS sebesar 105,91% dengan kategori Sangat Baik. Selain itu, baiknya hasil kinerja didukung perwujudan hasil Dinas Pendidikan dengan capaian kinerja 98,78%, dan ditambah adanya peningkatan hasil capaian HLS sebesar 0,15 poin serta RLS sebesar 0,16 poin. Tetapi, ada ketidaksesuaian relevansi kinerja. Dimana ketidaksesuaian kegiatan atau program IKU dengan permasalahan capaian IPM dilapangan.

Tabel 1. 43 Peningkatan Capaian HLS dan RLS Kabupaten Blora

Periode Tahun	Dimensi Pendidikan	
	(HLS)	(RLS)
2021	12,35	6,99
2020	12,20	6,83
Peningkatan	0,15 poin	0,16 poin

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Hal ini diungkapkan langsung oleh Bapak Widodo, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ (dampak hasil) Karena ini kan keseluruhan, ini tidak bisa kita ke poin Rata-Rata Lama Sekolah aja. Penilaian SAKIP kan secara umum mungkin disatu sisi program yang lain tercapai, tapi poin berkaitan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah nya mungkin tidak tercapai. Untuk mencapai tinggi Rata-Rata Lama Sekolah biar tinggi, itu kan tidak hanya missal tahun target sekian. Tetap naik, tapi itu tidak ada upaya yang terprogram, yang terstruktur gitu loh. Supaya, terprogram dan terstruktur kan, Pendidikan Non-formal itu yang digerakan. Gini ini cerita saja ya paradoks, memang selama

ini ada ketidaksinkronan antara perencanaan dengan penganggaran, termasuk IKU (Indikator Kinerja Utama), contoh yang tadi saya sampaikan. Indikator Kinerja Utama kita kan ada 10 lah, misalnya APS (Angka Partisipasi Sekolah), kedua Presentasi Guru SD yang Bersertifikat Pendidik, tetapi tidak ada program yang mendukung itu, kan jadi paradoks. Seharusnya, program kita itu mengangkat nilai nya rendah menjadi tinggi. Kebanyakan program tahun ini sama dengan tahun kemarin. Banyak program yang tidak mengacu pada Indikator Kinerja Utama. (Permasalahan bukan pada Kinerja), bukan. Jan e kegiatan itu dilakukan untuk mencapai nilai-nilai itu tapi tidak dan kan ora nyambung (tidak nyambung).

Menyambung pembicaraan mengenai pencapaian Dimensi Pendidikan yaitu, HLS dan RLS. Menurut Bapak Widodo, selama ini ada ketidaksinkronan IKU Bupati dengan permasalahan penunjang Dimensi Pendidikan IPM. Misalnya, dari 10 IKU Bupati perhatian Angka Putus Sekolah (APS) dan Presentase Guru SD Bersertifikat masih kurang. Itu terlihat ketika aktivitas kinerja kegiatan atau program tidak menjangkau permasalahan tersebut. Alhasil, aktivitas dalam rencana kerja tidak sepenuhnya berdampak dan terkesan kurang maksimal upayanya. Beliau juga menambahkan, itu bukan bagian dari hasil kinerja Dinas terkait melainkan hanya tidak sesuai dengan IKU saja. Artinya, baiknya hasil kinerja memang sudah tanggung jawab Dinas terkait menjalankan aktivitas kinerja dan sudah seharusnya. Tetapi, ketidaksesuaian ini muncul ketika aktivitas kinerja tidak sepenuhnya maksimal mendukung capaian HLS dan RLS Kabupaten Blora.

Dipertegas, ketidaksesuaian tidak berasal dari hasil kinerja. Hasil kinerja berasal dari penilaian target *input* maupun *output* dari Dinas terkait. Sedangkan masalah berasal dari tidak sesuainya IKU menjawab

sepenuhnya permasalahan capaian HLS dan RLS. Menurut Bapak Widodo, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Ya sudah bekerja, tapi banyak kerjaan itu yang diluar (IKU), dan seharusnya itu (program IKU) dikerjakan dahulu. Belum nyambung ke itu (IKU), mestinya kan fokus kita harus nyambung ke IKU tadi. Individu kan banyak kegiatan, tetapi ini belum fokus. Jadi tadi, tinggi karena proses *input* dan *output*. Tetapi rendah karena dibandingkan dengan daerah lain. Programnya juga belum mengena secara umum atau belum terprogram dan terstruktur Pendidikan Non-formalnya.

Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain memang rendah. Beliau menambahkan, kegiatan atau program yang ada selain tidak sesuai IKU juga belum ada yang terprogram dan terstruktur menyentuh Pendidikan Non-Formal. Sehingga aktivitas kinerja kurang menyeluruh menjawab tantangan capaian HLS dan RLS pada Dimensi Pendidikan IPM di Kabupaten Blora.

Jelas terlihat, Dinas Pendidikan sudah mengusahakan kinerja dengan baik dan berdampak. Pelaporan hasil kinerja yang sesuai dengan target, menjadi gambaran berhasilnya kinerja Dinas terkait. Menurut Bapak Mas Sugiarto M., M.Pd. selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Dewan Pendidikan itu badan resmi yang dibentuk oleh Bupati dan ada Permenya. Beranggotakan 11 orang berasal dari beberapa background ada praktisi pendidikan, LSM, pemerintahan, wiraswasta, keagamaan, dan seterusnya. Apa apa kita diundang, dimintai masukan, memang kita tugasnya seperti itu. Setiap tahunnya Dinas Pendidikan mengadakan evaluasi, mengadakan program dan kami diundang. Untuk kinerja Dinas Pendidikan yang meliputi Visi Misi hingga ke anggaran itu struktural dan kita tidak menyentuh

kesana. Kita hanya memberikan masukan atas permasalahan dilapangan dari masyarakat, misalnya anak hamil, anak putus sekolah, hingga gedung roboh kita memastikan anak-anak pada sekolah atau tidak, dan hanya itu saja. Iya program otomatis berdampak bagi masyarakat, namanya manusia pastinya gada yang sempurna, begitupun kinerja dari Dinas Pendidikan. Kalau kita menilai atau sebagainya itu bukan kapasitas kami, kita hanya dianggap *wong tuo* (orang tua). Kalau dampak itu teknis, dia (Dinas Pendidikan) pastinya sudah punya ukuran sendiri. Punya indikator yang baik atau tidak. Kemarin saya melihat dilaporkan baik-baik saja.

Sebagai Aktor Semi Pemerintah, Dewan pendidikan melihat hasil kinerja Dinas terkait upaya aktivitas kinerja tergolong baik. Ini diungkapkan langsung oleh Ketua Dewan Pendidikan yang menyatakan hasil pelaporan kinerja itu baik, tetapi mungkin secara teknis Dinas Pendidikan memiliki indikator tersendiri dalam melihat keberhasilan kegiatan atau program yang ada dalam pemenuhan HLS dan RLS.

Prioritas anggaran menjadi hambatan pemenuhan kinerja yang berdampak. Saat ini, anggaran Dinas Pendidikan masih difokuskan pada Pendidikan Formal. Di tahun sebelumnya kegiatan atau program Pendidikan Non-Formal yang berkaitan dengan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) belum menyentuh karena anggaran. Tetapi ditahun 2023, Dinas Pendidikan berkomitmen memberikan perhatian Pendidikan Non-Formal sebagai langkah berdampak meningkatkan HLS dan RLS Kabupaten Blora. Bentuknya, Program Kesetaraan yang mampu menjawab tantangan permasalahan Dimensi Pendidikan IPM saat ini. Diungkapkan oleh Bapak Widodo, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Hambatan tadi, anggaran kita masih belum terfokus juga. Ada tapi kita cenderung ke formal, kita bicara bukan masalah umum. Kita bicara tentang Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Berarti kita harus fokus menganggarkan program yang terkait dengan peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Di tahun 2023 ada komitmen kita bersama karena tadi, karena kita kepengen untuk meningkatkan Angka Rata-Rata Lama Sekolah. Komitmen pimpinan sampai turunan kan harus sama. Jadi kita sudah mendapatkan lampu hijau lah, dianggarkan untuk 2023. Bentuknya Program Pembelajaran (Program Kesetaraan), terus di evaluasi dan di monitoring. Nanti akan dilihat satu tahun, dua tahun.

Mendukung pernyataan, diungkapkan oleh Bapak Widodo, S.Pd., M.Pd selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Hambatan (upaya Program Pembelajaran) ini karena belum dilakukan upaya ini saya kira belum ketemu. Tapi saat ini saya upaya kesana. Perkiraan saya, hambatan itu ya persamaan persepsi yang penting untuk menghitung Angka Rata-Rata Lama Sekolah, yang kedua terkait dengan pihak-pihak lain perlu dukungan. Misalnya BPS untuk bisa menerima bahwa konsep perumusan itu seperti ini. Biar sama upaya nya menurut saya perlu FGD, sering yang melibatkan beberapa pihak BAPPEDA, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, atau dari pihak-pihak lain yang memang yang berkecimpung di program itu (lembaga-lembaga Pendidikan Non-formal). Termasuk DINDUKCAPIL dan BPS, untuk mempersamakan persepsi.

Kolaborasi antar Dinas terkait dimungkinkan untuk menyamakan persepsi terkait pemenuhan Program Pembelajaran atau Program Kesetaraan yang nantinya menjadi bagian kinerja dari Dinas Pendidikan. Adanya pertukaran pikiran melalui FGD bersama Dinas terkait seperti BAPPEDA dan DINDUKCAPIL menjadi harapan berhasilnya program ini. Perlunya fokus kepentingan bersama juga mendapat perhatian dari Dewan Pendidikan. Bapak Mas Sugiarto M., M.Pd. selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Blora, bahwa:

“ Iya program otomatis berdampak bagi masyarakat, namanya manusia pastinya gada yang sempurna, begitupun kinerja dari Dinas Pendidikan. Kalau kita menilai atau sebagainya itu bukan kapasitas kami, kita hanya dianggep wong tuo (orang tua). Kalau dampak itu teknis, dia (Dinas Pendidikan) pastinya sudah punya ukuran sendiri. Punya indikator yang mau atau tidak. Kemarin saya melihat dilaporkan baik-baik saja. Kalau saya melihatnya, mesti adanya yang kurang. Mungkin harus dimaksimalkan kembali kinerja dengan mengoptimalkan kembali realisasi program dengan mengesampingkan berbagai macam kepentingan didalamnya.

Dewan Pendidikan sebagai institusi semi pemerintahan melihat kinerja Dinas Pendidikan sudah berdampak. Terlihat dalam keterlibatan Dewan Pendidikan sebagai penasehat ketika terjadi permasalahan di lapangan. Anggapan ‘Wong Tuo/Orang Tua’ menyatakan kedekatan antara Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan. Selain itu, penting bahwa mengutamakan kepentingan masyarakat merupakan prioritas utama Dinas Pendidikan agar aktivitas kinerja melalui kegiatan atau program sepenuhnya berdampak pada capaian HLS dan RLS Dimensi IPM.

Dimensi Standar Hidup yang Layak, dilihat perwujudan kinerja Dinas terkait belum sepenuhnya berdampak maksimal. Kegiatan atau program Dinas terkait secara tidak langsung hanya penunjang peningkatan Pendapatan Rill Perkapita yang Disesuaikan. Selain itu, hasil kinerja Dinas terkait capaian IPM mengalami penurunan periode tahun 2019-2020. Dimana indikator IPM ini turun sebesar 2,29% atau 224 poin dari semula 9.795 rupiah berubah 9.571 rupiah. Jika dilihat dari hasil kinerja IKU dalam Sasaran 10 memang memiliki pencapaian kinerja sebesar 101,94% dengan kategori Sangat Baik. Ditambah, hasil kinerja anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar 86,34%

dan DPUPR sebesar 91.17%. Ini menunjukkan betapa baiknya kinerja Dinas Terkait dalam mencapai hasil kinerja atas proyeksi tetapan target.

**Tabel 1. 44 Peningkatan Pendapatan Rill Per Kapita Disesuaikan
Kabupaten Blora**

Periode Tahun	Dimensi Standar Hidup yang Layak (Pendapatan Rill Per Kapita Disesuaikan)
2021	9.669
2020	9.571
Peningkatan	98 poin

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Kondisi ini diungkapkan oleh Ibu Eny Kurniasih, S.E., MM., selaku Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Blora, bahwa:

“ Secara Program dan Kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Per Kapita memang tidak begitu signifikan. Namun dengan demikian adanya Program dan Kegiatan yang menjadi Tujuan dan Sasaran SAKIP ini secara tidak langsung bisa. Saya katakan secara tidak langsung bisa, tetapi kalau untuk mengukur seberapa banyak berpengaruh pada peningkatan pendapatan itu yang kita tidak bisa menunjukkan, karena harus ada Indikator yang jelas untuk peningkatan pendapatan rill dengan formulasi yang ditentukan. Tidak bisa menjawab karena ini kumulatif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Blora bukan dari Dinperinaker, tetapi alasan mengapa dimensi IPM Standar Hidup yang layak atau pendapatan Rill Perkapita itu rendah sudah dijawab.

Belum adanya indikator secara pasti mengukur dampak dari kegiatan atau program Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, juga menjadi hambatan penilaian berdampak. Tetapi, Dinas terkait sudah berusaha agar tujuan kinerja dalam Sasaran SAKIP secara tidak langsung berdampak bagi peningkatan Pendapatan Rill Perkapita yang Disesuaikan guna mendukung peningkatan IPM Kabupaten Blora.

Masalah lain terlihat dari keberhasilan infrastruktur, tetapi hanya sebagai penunjang aktivitas perekonomian masyarakat. Meskipun hasil kinerja evaluasi SAKIP dan anggaran di nilai baik. Menurut Bapak Ir. Tedi Rindaryo Widodo selaku Sekretaris DPUPR Kabupaten Blora, bahwa:

“ Jadi kalau infrastruktur sebenarnya tidak langsung per kapita nya ya karena tergantung bagaimana pertumbuhan ekonomi disana. Jadi infrastruktur itu sarana penunjang peningkatan per kapita, kita dari sisi itu tidak mengamati sejauh itu, itu ada sektornya sendiri, kalau data per kapita kita tidak punya. Karena terget kita bukan peningkatan per kapita, kita hanya sebagai *support system* yang ada di Kabupaten untuk meningkatkan per kapita, seperti itu.

Infrastruktur, tidak secara langsung berdampak pada capaian Dimensi Standar Hidup yang Layak. Tetapi, lebih kepada *support system* agar mendukung aktivitas perekonomian masyarakat.

Dengan mudahnya mendapat akses transportasi sebagai penunjang sarana yang nantinya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Menurut Bapak Ir. Tedi Rindaryo Widodo selaku Sekretaris DPUPR Kabupaten Blora, bahwa:

“ Prioritas, memberikan prioritas pada jalan-jalan yang mempunyai akses meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, yang jelas itu. Kalau lihat *existing* dilapangan sangat sangat kontradiktif.

Prioritas anggaran, menjadi langkah solusi diambil guna efektivitas dan efisiensi anggaran. Perwujudanya dengan memilih kebutuhan berfokus pada prioritas akses utama perekonomian masyarakat Kabupaten Blora.

2.3. Kinerja Pencapaian IPM Kabupaten Blora

Kinerja Pemerintah Kabupaten Blora berasal dari perbandingan antara target dengan realisasi, berupa capaian akhir kuantitatif presentase. Kinerja memiliki sasaran strategis dengan turunan indikator di dalamnya. Menurut LKjIP Kabupaten Blora tahun 2021 atas penilaian SAKIP menyatakan Perda No. 10 Tahun 2006 tentang RPJMD (2016-2021), dilanjut Perbub No. 44 Tahun 2019 tentang IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (2017-2021), memuat Perjanjian Kerja tahun 2021 yang memberikan gambaran 22 Indikator Kinerja dan 11 Sasaran Startegis. Pencapaian Indikator Kinerja dengan rincian predikat, yaitu 16 (Sangat Baik), 2 (Baik), 1 (Cukup), 1 (Rendah), 1 (Sangat Rendah), dan 1 belum diketahui hasilnya. Menunjukan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dipandang memiliki penilaian baik oleh Pemerintah Pusat. Beberapa perwujudan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora dengan predikat Sangat Baik tertulis dalam aktivitas pemenuhan pencapaian IPM tahun 2021.

Kinerja Dimensi Kesehatan, termasuk dalam Sasaran 9 (sembilan) dengan Indikator Kinerja UHH. Memiliki capaian kinerja 100,69% atau predikat Sangat Baik. Realisasi mendapat hasil 74,51 tahun (meningkat 0,13% dari tahun 2020) atau melebihi target sebesar 74 tahun. Melihat lebih di tahun sebelumnya, UHH juga mengalami peningkatan. Rentang tahun 2019-2020, UHH meningkat sebesar 0,14% yang semula 74,23 menjadi 74,41. Selain itu, jika di lihat daya saing tingkat lebih tinggi, UHH Kabupaten Blora lebih unggul 2,94 tahun dari rata-rata nasional dan 0,04 dari rata-rata

provinsi. Didukung dengan realisasi anggaran atas program atau kegiatan kategori berhasil yaitu 81,16%. Artinya kinerja Pemerintah Daerah upaya pencapaian IPM dalam dimensi kesehatan dapat dikatakan baik. Meskipun dalam pencapaian UHH ini bersifat makro, atau melibatkan banyak dinas untuk berkontribusi. Tetapi porsi terbesar tergambar pada khususnya tugas tergambar dalam kegiatan atau program dari Dinas Kesehatan dan DPPKB Kabupaten Blora.

Tabel 1. 45 UHH Kabupaten Blora 2019-2021

Dimensi	2019	2020	Target	2021	Capaian
UHH	74,23	74,41	74 tahun	74,51 tahun	100,69%

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Tabel 1.46 Kinerja Dimensi Kesehatan Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Capaian	Realisasi	Anggaran
1.	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan	66,43%	6.545.271.036	9.853.610.000
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	81,95%	63.578.370.532	77.578.850.727
3.	Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makan minuman	74,20%	192.828.300	259.869.000
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan	64,34%	201.120.840	312.605.000
5.	Program Pembinaan KB	90,34%	7.117.664.458	7.878.914.502
6.	Program Pengendalian Penduduk	99,75%	101.720.000	101.975.000
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	99,16%	892.752.000	900.300.000
	Rata-Rata Total	81,16%	78.629.727.166	96.886.124.229

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Kinerja Dimensi Pendidikan, termasuk dalam Sasaran 8 (delapan) dengan Indikator Kinerja HLS dan RLS. Untuk HLS memiliki capaian

kinerja 96,11% dan RLS memiliki capaian 105,91% atau keduanya mendapat predikat Sangat Baik. Realisasi HLS mendapat hasil 12,35 tahun (meningkat 1,23% dari tahun 2020), tetapi tidak melebihi target awal sebesar 12,85 tahun. Untuk RLS, mendapat hasil 6,99 tahun (meningkat 2,34% dari tahun 2020), dan melebihi target sebesar 6,60 tahun. Melihat lebih di tahun sebelumnya, HLS dan RLS juga mengalami peningkatan. Rentang tahun 2019-2020, HLS meningkat sebesar 0,08% yang semula 12,19 menjadi 12,20. Untuk RLS, meningkat sebesar 3,80% yang semula 6,58 menjadi 6,83.

Penilaian capaian kinerja ini selaras dengan meningkatnya dimensi pendidikan setiap tahunnya. Selain itu, jika dilihat daya saing tingkat lebih tinggi, HLS Kabupaten Blora lebih rendah 2,94 tahun, dan RLS lebih rendah 1,65 tahun dari rata-rata nasional. Sedangkan rata-rata provinsi, HLS lebih rendah 0,40 tahun dan RLS lebih rendah 0,86 tahun. Selanjutnya, realisasi anggaran atas program atau kegiatan kategori berhasil yaitu 100,76% (sebagian besar difokuskan untuk Covid-19). Menjadi gambaran bahwa kinerja Pemerintah Daerah upaya pencapaian IPM dalam pendidikan yang memuat HLS dan RLS dapat dikatakan baik.

Tabel 1. 47 HLS dan RLS Kabupaten Blora Tahun 2019-2021

Dimensi	2019	2020	2021		
			Target	Realisasi	Capaian
HLS	12,19	12,20	12,85 tahun	12,35 tahun	96,11%
RLS	6,58	6,83	6,60 tahun	6,99 tahun	105,91%

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Tabel 1. 48 Kinerja Dimensi Pendidikan Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Capaian	Realisasi	Anggaran
1.	Program Pengembangan Kurikulum	98,58%	49.014.000	49.722.000
2.	Program Pengelolaan Pendidikan	100,84%	159.951.707.273	158.616.937.552
3.	Program Pembinaan Perpustakaan	74,11%	310.832.106	419.400.000
4.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	96,52%	168.671.050	174.746.900
5.	Program Pengelolaan Arsip	95,88%	203.776.500	212.530.000
6.	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	99,75%	101.720.000	101.975.000
7.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	88,85%	7.970.000	8.970.000
	Rata-Rata Total	100,76%	160.691.970.929	159.482.306.452

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Terakhir, kinerja Dimensi Standar Hidup yang Layak, termasuk dalam Sasaran 10 (sepuluh) dengan Indikator Kinerja Pendapatan Rill Perkapita. Memiliki capaian kinerja 101,94% atau predikat Sangat Baik. Realisasi mendapat hasil 9.669 rupiah (meningkat 1,02% dari tahun 2020) atau melebihi target sebesar 9.485 rupiah. Melihat lebih di tahun sebelumnya, Pendapatan Rill Perkapita juga mengalami penurunan. Rentang tahun 2019-2020, Pendapatan Rill Perkapita menurun sebesar 2,29% yang semula 9.795 rupiah menjadi 9.571 rupiah. Selain itu, jika di lihat daya saing tingkat lebih tinggi, Pendapatan Rill Perkapita Kabupaten Blora lebih rendah 1.487 rupiah dari rata-rata nasional dan 1.365 rupiah dari rata-rata provinsi. Realisasi anggaran atas kegiatan atau program kategori berhasil yaitu 93,30% (sebagian difokuskan untuk penanganan Covid-19). Jika dibandingkan dengan capaian kinerja 101,94% ke rata-rata capaian 93,30%, maka efektivitas penggunaan

anggaran Pemerintah Daerah bersama dengan dinas terkait dalam pencapaian realisasi Dimensi Pendidikan masih dikatakan baik.

Tabel 1. 49 HLS dan RLS Kabupaten Blora Tahun 2019-2021

Dimensi	2019	2020	Target	2021 Realisasi	Capaian
Pendapatan Rill Perkapita	12,19	12,20	9.485 rupiah	9.669 rupiah	101,94%

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Tabel 1. 50 Kinerja Dimensi Pendidikan Tahun 2021

No.	Program / Kegiatan	Capaian	Realisasi	Anggaran
1.	Program Standarisasi dan perlindungan Konsumen	99,88%	44.945.500	45.000.000
2.	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	78,30%	435.481.640	556.182.400
3.	Program Pengembangan UMKM	99,88%	99.880.780	100.000.000
4.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	71,81%	313.814.920	437.000.000
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	92,08%	654.711.092	711.000.000
6.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	94,91%	1.006.055.824	1.060.000.000
7.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	76,33%	15.265.620	20.000.000
8.	Program Penyuluhan Pertanian	95,01%	456.046.500	480.000.000
9.	Program Penyediaan Pengembangan Sarana Pertanian	97,21%	2.301.891.350	2.368.065.000
10.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	96,06%	26.319.120	27.400.000
11.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	97,87%	347.421.550	355.000.000
12.	Program Pengembangan Kebudayaan	99,84%	653.933.950	655.000.000
13.	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	97,93%	50.847.700	51.920.000
	Rata-Rata Total	93,30%	6.406.615.546	6.866.567.400

Sumber: LKjIP Kabupaten Blora Tahun 2021

Realisasi kinerja Pemerintah Daerah dengan bidang khusus pada dimensi IPM dibebankan kepada Satuan Kerja atau Dinas terkait (Mahsun, M., 2018:198). Dalam RKPD Kabupaten Blora tahun 2021 bidang kesehatan dipegang oleh Dinas Kesehatan di dukung DPPKB, bidang pendidikan oleh Dinas Pendidikan, dan bidang tenaga kerja oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Tujuan pengarahannya selain wewenang berlaku, juga sebagai upaya mempusatkan pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD. Memiliki 2 (dua) gambaran, yaitu IKU dan IKK dengan melihat capaian kinerja itu sendiri. Selanjutnya, melihat kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora proyeksi IKU dan IKK di dalam RPJMD periode 2021-2026, sebagai berikut:

2.3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU tergambar dalam proyeksi RPJMD Kabupaten Blora periode 2021-2026. Dimana BAB V menjelaskan bahwa IKU sendiri sebagai indikator kinerja untuk melihat dampak dari keluaran (*outcome*) program atau kegiatan pembangunan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Blora. Menurut BAB VIII tentang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora dalam RPJMD, sasaran IKU proyeksi pandangan di periode tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Masa pandemi Covid-19 berpotensi tinggi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hingga April 2022, diharapkan kebijakan

baru membawa iklim positif bidang ekonomi dan selanjutnya April 2022-2026, ekonomi Kabupaten Blora kembali normal.

2. Proyeksi di poin 2 (dua), akan membawa peningkatan pada indikator di dalamnya seperti kesejahteraan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan kondusifitas daerah, dilanjutkan infrastruktur dan lingkungan hidup.
3. Tujuan peningkatan akan diupayakan melalui aktivitas strategis melalui program atau kegiatan berdasar sasaran capaian IKU.

RPJMD menjelaskan 9 (sembilan) indikator pembentuk IKU. Hasil rencana strategis kinerja Pemerintah Daerah di proyeksikan meningkat. Pembangunan manusia dalam IPM di proyeksikan meningkat hingga tahun 2026, dimana tahun akhir masuk kategori Tinggi dengan capaian 70,04%. Tidak hanya IPM, tetapi semua aspek indikator IKU juga terus meningkat. Seperti pertumbuhan ekonomi pada tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19 menurun dan diproyeksikan pada tahun 2026 meningkat sebesar 3-5% dari tahun sebelumnya. Peningkatan IKU oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora merupakan realisasi upaya meningkatkan kinerja dalam rencana pembangunan melalui program atau kegiatan yang memiliki manfaat bagi masyarakat di daerah. Peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora yang tergambar dalam RPJMD ini seakan mendorong kemajuan tingginya capaian indikator untuk masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 1.51 IKU Periode Tahun 2021-2026

Indikator IKU	Akhir (2026)	2025	2024	2023	2022	Awal (2021)
IPM	70,04%	69,84%	69,64%	69,44%	69,24%	69,04%
IPG	84,19	84,14	84,09	84,04	83,99	83,94
IKLH	70,13	70,01	69,89	69,77	69,65	69,53
IPMas	0,68	0,67	0,66	0,65	0,64	0,63
Indeks Reformasi Birokrasi	71 (BB)	69 (BB)	67 (B)	65 (B)	62 (B)	60,2 (B)
Presentase Penduduk Miskin	10,28%	10,56%	10,84%	11,2%	11,4%	11,68%
Laju Inflasi	2,5-6%	2,5-6%	2,5-6%	2,5-6%	2,5-6%	2,5-6%
Pertumbuhan Ekonomi	3-5%	3-5%	3-5%	3-5%	2-4%	2-4%
Tingkat Pembangunan Infrastruktur	87,49%	86,55%	86,79%	85,60%	84,40%	82,96%

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

2.3.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Selaras IKU pada BAB VIII RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026, IKK sebagai ukuran kinerja juga diproyeksikan meningkat setiap tahun yang tersusun dalam indikatornya. IKK sebagai rencana kerja berdasar periode jabatan Pemerintah Daerah. Cakupan IKK lebih luas, dimana terbagi dalam 3 (tigas) aspek, yaitu Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Umum dan Daya Saing. Aspek Kesejahteraan Masyarakat ini sama dengan IKU yang menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi di daerah, termasuk didalamnya IPM. Sedangkan turunan dimensi pembentuk IPM ada pada aspek lainya. Pelayanan Masyarakat, sesuai namanya untuk melihat seberapa besar capaian Pemerintah Daerah untuk melayani kepentingan masyarakatnya. Aspek Daya Saing memperlihatkan daya upaya pemerintah meningkatkan potensi daerah.

Setidaknya ada 65 Indikator Kinerja Daerah termuat dalam ketiga aspek IKK dengan proyeksi meningkat. IKK menjelaskan lebih rinci penjabaran dimensi IPM yang tertuang dalam aspek Pelayanan Umum dan Daya Saing. Dimana aspek Pelayanan Umum memuat dimensi kesehatan dan dimensi pendidikan, sedangkan aspek Daya Saing memuat keterikatan dimensi standar hidup yang layak. Meskipun dalam hal ini pendapatan riil per kapita disesuaikan tidak dijabarkan secara pasti. Tetapi, ada keterkaitan PDRB dan kaitan dengan konsumsi.

Tabel 1.52 Proyeksi IKK Periode Tahun 2021-2026

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (IKU)						
B. Aspek Pelayanan Umum						
Indikator	Akhir (2026)	2025	2024	2023	2022	Awal (2021)
1. Pendidikan						
RLS	7,55	7,43	7,31	7,19	7,07	6,95
Angka HLS	12,50	12,45	12,40	12,35	12,30	12,25
2. Kesehatan						
UHH	75,07	74,96	74,85	74,74	74,63	74,52
3. Perdagangan						
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%
C. Aspek Daya Saing						
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	902.132	902.132	905.797	717.653	731.050	613.941
Pengeluaran konsumsi non-pangan per kapita	48	48,19	49,75	47,12	45,17	48,44
Rasio Ekspor ditambah Impor terhadap PDRB (Indikator Keterbukaan Ekonomi)	NA	NA	24,83	26,28	22,21	21,28

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

Ket: *) Tabel disesuaikan atas turunan dimensi IPM dan kebutuhan penelitian.

2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

2.4.1. IPM Global

IPM diterbitkan kali pertama tahun 1990 oleh *UNDP*. IPM dimaknai sebagai tujuan atas hidup manusia mencakup penghargaan kebebasan dan kesempatan setiap individu (*UNDP*, 2020:23). Kebijakan IPM global tertuang dalam “*Human Development Report (HDR)*”, memuat dimensi yaitu, Lama Umur dan Kesehatan (Kesehatan), Pendidikan, dan Standar Hidup yang Layak dengan beberapa kali perubahan. Kebijakan berupa koordinasi sebagai aktivitas mobilisasi untuk anggota (*Colebatch, H., 2009:11*). HDR terbit setiap tahun, kecuali di tahun 2012. Berhasilnya capaian IPM menentukan peringkat (*rank*) dan kelompok (*group*) atas tingkat (*tier*) yang ditetapkan oleh *UNDP*. Ukuran ini menjadi stimulan kontestasi negara di dunia dalam pencapaian IPM negara. Tahun 2021, negara Swiss menjadi peringkat 1 (satu) IPM Dunia dengan perolehan 0.962 (atau 96,62% perhitungan Indonesia) dengan pengkategorian Sangat Tinggi di semua dimensi pembentuknya.

Tabel 1.53 Contoh Negara Berdasar Kelompok IPM Tahun 2021

IPM Dunia Tahun 2021				
No.	Negara	IPM	Peringkat	Kelompok
1.	Switzerland	0.962	1	Sangat Tinggi Tinggi Medium/Standar Rendah
2.	Brazil	0.705	87	
3.	Philipina	0.699	113	
4.	Pakistan	0.544	161	

Sumber: HDI Report 2021-2022

2.4.2. IPM di Indonesia

Eksistensi IPM di dunia membuat Indonesia mengadopsi sistem. IPM di nilai sesuai dengan kondisi negara. Pengukuran IPM di Indonesia di mulai tahun 1996, pada saat kepemimpinan Presiden Soeharto (BPS, 2014). Dimana awalnya diketahui hasil IPM setiap 3 (tiga) tahun sekali, sampai tahun 2004 di perhitungkan setahun sekali. Perbaikan kebijakan terus dilakukan pada tahun 2010 oleh UNDP. Tetapi, Indonesia baru menggunakan kebijakan dengan pertimbangan metode baru pada tahun 2014. Melalui metode baru ini, capaian IPM Indonesia meningkat di tahun 2014 yaitu, 68,90% atau kategori Sedang (BPS, 2014). Hingga saat ini, Indonesia masih menggunakan metode perhitungan dimensi pembentuk IPM dari UNDP terbaru, meliputi Dimensi Kesehatan (Umur Harapan Hidup Saat Lahir/UHH), Dimensi Pengetahuan (Harapan Lama Sekolah/HLS dan Rata-rata Lama Sekolah/RLS), serta Dimensi Standar Hidup yang Layak (Pendapatan riil per kapita yang disesuaikan) (BPS, 2021).

Perkembangan realitas kehidupan masyarakat membuat Pemerintah terus berupaya serius dalam pencapaian IPM. Upaya direalisasikan dalam perbaikan peringkat IPM dunia melalui pencapaian IPM Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Dimana periode tahun 2018-2021, peringkat IPM Indonesia terendah pada tahun 2021 dengan posisi 114 (dari 189 negara) dan tertinggi di tahun 2019-2020 dengan posisi 107. Jelas Indonesia tertinggal daripada negara tetangga seperti

dalam peringkat, Australia (5), Singapura (12), Malaysia (60) dan Thailand (66) ditahun 2021. Pencapaian IPM Indonesia tertinggi ada pada tahun 2021 (72,29%), dan terendah pada 2018 (71,39%). Tahun 2021, tahun capaian tertinggi IPM dan terendah secara peringkat dunia.

Di masa Pandemi Covid-19, periode tahun 2019 hingga akhir tahun 2020 peningkatan IPM juga terjadi. Dimana semula 71,92% meningkat menjadi 71,94%, meskipun pertumbuhan hanya 0,041%. Jika melihat pertumbuhan capaian IPM Indonesia tahun 2018-2021, tahun 2018 pertumbuhan tertinggi yaitu, 0,82 poin, dan terendah tahun 2020 (masa pandemi Covid-19) sebesar 0,03 poin. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengupayakan peningkatan IPM dengan memberikan perhatian atas pencapaian IPM nasional. Sehingga, melalui upaya atas kinerja pemerintah diharapkan membawa IPM Indonesia lebih baik lagi dalam meningkatkan capaian dan mampu di posisi teratas IPM dunia.

Tabel 1.54 Capaian IPM Indonesia

Capaian IPM Jawa Tengah	Periode Tahun Capaian IPM			
	2018	2019	2020	2021
	71,39%	71,92%	71,94%	72,29%

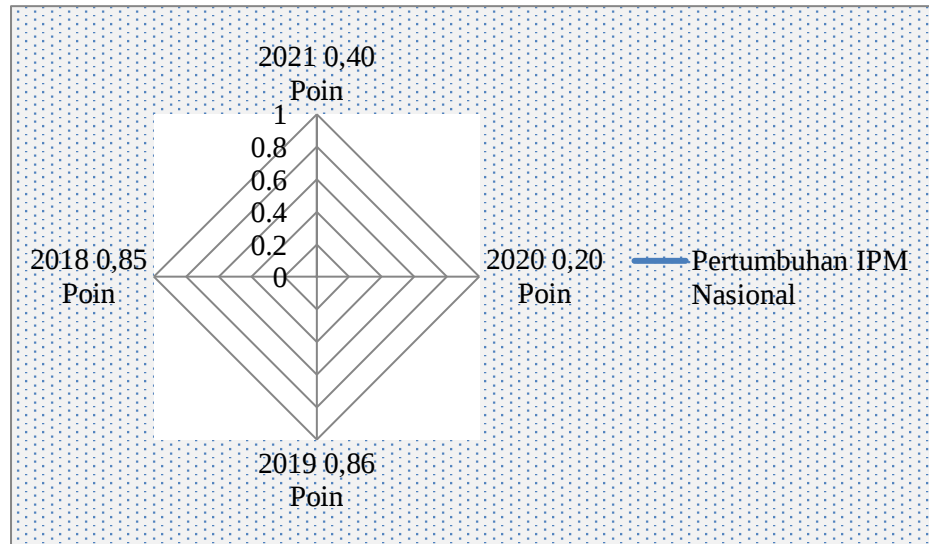
Sumber: BPS RI 2021

Tabel 1.55 Pertumbuhan dan Peringkat IPM Indonesia

Tahun	Pertumbuhan IPM Indonesia	Peringkat IPM Dunia
2021	0,49 Poin	114
2020	0,03 Poin	107
2019	0,74 Poin	107
2018	0,82 Poin	111

Sumber: HDI Report 2019-2022

Gambar 1.3 Pertumbuhan IPM Indonesia dalam Radar



Sumber: BPS RI 2021

Peningkatan dimensi IPM menjadi alasan IPM Indonesia tumbuh. Meskipun ditengah pandemi Covid-19. Menurut kajian BPS (2021), dimulai UHH (Umur Harapan Hidup Saat Lahir) di tahun 2021, mengalami peningkatan 0,1 poin (0,14%) atau jika di jelaskan, ada peningkatan 0,1 tahun umur hidup masyarakat dari 71,47 menjadi 71,57. UHH pada kisaran tahun ini juga menjadi pertumbuhan terendah karena angka morbiditas (penduduk sakit) menurun 1,60% ditahun 2021 yaitu, 13,04% dari awal 14,64%. Selanjutnya RLS, juga meningkat di setiap tahunnya. Dimana peningkatan tertinggi di tahun 2019 dengan 0,17 poin (2,08%) dari tahun sebelumnya, yaitu 8,17 menjadi 8,34. Dilengkapi HLS (Harapan Lama Sekolah), dimana peningkatan tertinggi ditahun 2021 sebesar 0,10 poin (0,77%), bermula dari 12,98 menjadi 13,08 tahun.

Menurut BPS (2021), meningkatnya HLS pada Dimensi Pendidikan berkat adanya penurunan angka putus sekolah sebesar 0,90% di tahun 2021. Terakhir, pengeluaran rill per kapita disesuaikan yang berbeda dengan turunan dimensi lain. Penurunan cukup tinggi terjadi di tahun 2020 (tahun terjadinya penyebaran Covis-19 di Indonesia), dimana menurun 286 poin (2,53%) yaitu, dari 11.299 rupiah menjadi 11.013 rupiah. Hingga ditahun 2021 meningkat kembali sebesar 11.156 rupiah atau 1,30%. Tumbuhnya dimensi pengeluaran rill per kapita disesuaikan karena pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik setelah bisa beradaptasi dari pandemi Covid-19. Realitas kondisi ini menjadi gambaran optimis atas proyeksi capaian IPM Indonesia dimasa akan datang yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 1.56 Capaian Dimensi IPM Indonesia

Tahun	Kesehatan (UHH)	Pendidikan (HLS)	(RLS)	Standar Hidup yang Layak (Pengeluaran rill per kapita)
2021	71,57	13,08	8,54	11.156
2020	71,47	12,98	8,48	11.013
2019	71,34	12,95	8,34	11.299
2018	71,20	12,91	8,17	11.059

Sumber: BPS RI 2021

Melihat lebih dalam kontribusi pencapaian IPM Provinsi di Indonesia. Pertumbuhan juga jelas terlihat meningkat di setiap tahun menyeluruh hampir setiap provinsi, dimana salah satu contoh capaian pertumbuhan IPM Provinsi tertinggi berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian IPM 76,88% (Tinggi) yang meningkat 0,84%.

Sedangkan diposisi terendah ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pertumbuhan sebesar 0,14% dan capaian IPM Provinsi sebesar 65,28% (Sedang). Untuk peringkat IPM tertinggi di Indoneisa, masih dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta dengan capaian 81,11% (Sangat Tinggi) dan otomatis menjadi peringkat 1 (satu), disusul DI Yogyakarta peringkat 2 (dua) dengan capaian 80,22% (Sangat Tinggi) dari 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan untuk IPM Provinsi terendah ada pada Provinsi Papua dengan capaian IPM sebesar 60,62% atau kategori Sedang.

Tabel 1.57 Pertumbuhan IPM Provinsi Periode Tahun 2020-2021

Pertumbuhan IPM Tertinggi				Pertumbuhan IPM Terendah			
No.	Provinsi	(%)	IPM (2021)	No.	Provinsi	(%)	IPM (2021)
1.	Kalimantan Timur	0,84	76,88%	1.	Nusa Tenggara Timur	0,14	65,28%
2.	Kalimantan Utara	0,79	71,19%	2.	Bali	0,25	75,69%
3.	Jawa Timur	0,60	72,14%	3.	Papua Barat	0,26	65,26%
4.	Nusa Tenggara Barat	0,59	68,65%	4.	Kepulauan Riau	0,26	75,79%
5.	Kalimantan Selatan	0,52	71,28%	5.	Aceh	0,26	72,18%

Sumber: BPS RI 2021

Tabel 1.58 Capaian IPM Provinsi di Indonesia

Peringkat IPM	Provinsi	IPM Tahun 2021
1	DKI Jakarta	81,11%
2	DI Yogyakarta	80,22%
3	Kalimantan Timur	76,88%
4	Kepulauan Riau	75,79%
5	Bali	75,69%
6	Sulawesi Utara	73,30%
7	Riau	72,94%
8	Banten	72,72%
9	Sumatera Barat	72,69%
10	Jawa Barat	72,45%

Sumber: BPS RI 2021

2.4.3. IPM di Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi dengan pertumbuhan capaian IPM tinggi di Indonesia. Meskipun masih berada di bawah rata-rata capaian IPM nasional, Provinsi Jawa Tengah memiliki capaian IPM 72,16% (Tinggi) dan peringkat 13 nasional pada tahun 2021 (BPS, 2021). Pencapaian kategori Tinggi tersebut semenjak 2017, yang semula mendapat capaian dengan kategori Sedang. Jika dibandingkan tahun 2020 ada peningkatan 0,4% atau 0,29 poin IPM yang sebelumnya 71,87%. Melihat kebelakang di tahun 2010 hingga 2021 rata-rata pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah tumbuh sebesar 0,80%.

Pertumbuhan tertinggi IPM Jawa Tengah terjadi pada tahun 2013 yaitu, 1,21 poin dan ini di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang hanya 0,91 poin. Pertumbuhan terendah di tahun 2016 yaitu 0,70 poin dibawah nasional yang sebesar 0,91 poin. Adanya pandemi Covid-19 periode tahun 2019-2020 tidak menutup tumbuhnya IPM Jawa Tengah meskipun tergolong rendah, dimana meningkat 0,20. Tetapi, pada tahun 2021 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,40 poin. Meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan terjadi, tetapi tetap dikatakan meningkat.

Tabel 1.59 Capaian IPM Provinsi Jawa Tengah

Capaian IPM Jawa Tengah	Periode Tahun Capaian IPM			
	2018	2019	2020	2021
	71,12%	71,73%	71,87%	72,16%

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Tabel 1.60 Pertumbuhan IPM Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Pertumbuhan IPM Jawa Tengah	Peringkat IPM Nasional
2021	0,40 Poin	13
2020	0,20 Poin	13
2019	0,86 Poin	14
2018	0,85 Poin	13

Sumber: BPS RI 2021

Pencapaian IPM Jawa Tengah tidak terlepas dari capaian dimensi pembentuk IPM. Tumbuhnya pencapaian ini terjadi atas kontribusi dari setiap dimensi pembentuk yang diwujudkan dari penambahan upaya perbaikan kualitas aktivitas program atau kegiatan kinerja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Menurut BPS Jawa Tengah (2021), dimensi IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan. Dimana Dimensi Kesehatan tergambar dalam Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) meningkat 0,10 poin dari 74,37 tahun (tahun 2020) menjadi 74,47 tahun. Dimensi Pendidikan dalam Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat 0,07 poin dari 12,70 tahun menjadi 12,77 tahun, sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) meningkat 0,06 dari 7,69 tahun menjadi 7,75 tahun. Selanjutnya, Dimensi Standar Hidup yang Layak dalam Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan meningkat 104 poin, dari 10.930 rupiah menjadi 11.034 rupiah. Jika dilihat lebih kebelakang periode tahun 2018-2021, Dimensi Standar Hidup yang Layak pada tahun 2020 menurun 172 poin, dari 11.102 rupiah menjadi 10.930 rupiah. Meskipun demikian, kondisi ini tidak menutup kemungkinan proyeksi IPM Provinsi Jawa Tengah meningkat dimasa mendatang.

Tabel 1.61 Capaian Dimensi IPM Provinsi Jawa Tengah

Tahun	Kesehatan (UHH)	Pendidikan (HLS)	(RLS)	Standar Hidup yang Layak (Pengeluaran rill per kapita)
2021	74,47	12,77	7,75	11.034
2020	74,37	12,70	7,69	10.930
2019	74,23	12,68	7,53	11.102
2018	74,18	12,63	7,35	10.777

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Distribusi kolektif Kabupaten/Kota membawa arah positif pertumbuhan IPM Jawa Tengah. Menurut kajian BPS (2021), bahwa pertumbuhan terbesar IPM di Kabupaten/Kota ada di Kabupaten Klaten (0,56 poin/0,74%), Kabupaten Grobogan (0,54 poin/0,77%), dan Kabupaten Blora (0,53 poin/0,77%). Pertumbuhan terendah 0,13 poin di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen. Meskipun terendah, kabupaten ini tetap berada di atas rata-rata provinsi. Tahun 2021, peringkat teratas IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Kota Salatiga dengan IPM sebesar 83,60% (Sangat Tinggi), sedangkan terendah Kabupaten Brebes dengan 66,32% (Sedang).

Melihat dimensi IPM Kabupaten/Kota, Dimensi Kesehatan memuat UHH tertinggi diperoleh Kabupaten Sukoharjo dengan 77,73 tahun dan terendah Kabupaten Brebes dengan perolehan 69,54 t ahun. Dimensi Pendidikan memuat HLS tertinggi diperoleh Kota Semarang dengan 15,53 tahun dan terendah Kabupaten Banjarnegara dengan 11,63 tahun. Dilanjut RLS, tertinggi Kota Semarang dengan 10,78 tahun dan terendah Kabupaten Brebes dengan 6,22 tahun. Selanjutnya Dimensi

Standar Hidup yang Layak memuat Pendapatan Rill Perkapita yang Disesuaikan tertinggi Kota Salatiga dengan 15.843 rupiah, dan terendah Kabupaten Pemalang dengan 8.573 rupiah. Dengan melihat *trend* tingkatan perkembangan dimensi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kontestasi nyata dari Kabupaten/Kota mengupayakan pencapaian IPM. Korelasi baik, dimana persaingan ini akan mendorong IPM Provinsi Jawa Tengah dimasa mendatang.

Tabel 1.62 Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
Periode Tahun 2020-2021

Pertumbuhan IPM Tertinggi				Pertumbuhan IPM Terendah			
No.	Kabupaten/Kota	(%)	IPM (2021)	No.	Kabupaten/Kota	(%)	IPM (2021)
1.	Gerobogan	0,77	70,41%	1.	Karanganyar	0,17	75,99
2.	Blora	0,77	69,37%	2.	Sragen	0,18	74,08
3.	Klaten	0,74	76,12%	3.	Semarang	0,19	74,24
4.	Pekalongan	0,69	70,11%	4.	Sukoharjo	0,19	77,13
5.	Kota Semarang	0,48	83,55%	5.	Boyolali	0,20	74,40

Sumber: BPS RI 2021

Tabel 1.63 Capaian IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Peringkat IPM	Kabupaten/Kota	IPM Tahun 2021
1	Kota Salatiga	83,60%
2	Kota Semarang	83,55%
3	Kota Surakarta	82,62%
4	Kota Magelang	79,43%
5	Kabupaten Sukoharjo	77,13%
6	Kabupaten Klaten	76,12%
7	Kabupaten Karanganyar	75,99%
8	Kota Tegal	75,52%
9	Kota Pekalongan	75,40%
10	Kabupaten Kudus	75,16%

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

2.4.4. IPM di Kabupaten Blora

Kabupaten Blora, daerah dengan pencapaian IPM berada di bawah Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Tetapi menariknya, pertumbuhan IPM di setiap tahunnya meningkat dan pada tahun 2021 menjadi salah satu pertumbuhan IPM tertinggi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selama periode tahun 2018-2021, pencapaian IPM Kabupaten Blora tertinggi di tahun 2021 sebesar 69,37%, dan terendah tahun 2018 sebesar 67,95%. Pertumbuhan IPM Kabupaten Blora mengalami peningkatan tertinggi di tahun 2019 dengan 0,70 poin, dan terendah pandemi Covid-19 tahun 2020 hanya tumbuh 0,19 poin. Selanjutnya, tahun 2021 tumbuh sebesar 0,53 poin atau meningkat 0,77%, dan menjadi gambaran upaya lebih Pemerintah Daerah Kabupaten Blora untuk bersaing diantara Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.64 Capaian IPM Kabupaten Blora

Capaian IPM Kabupaten	Periode Tahun Capaian IPM			
	2018	2019	2020	2021
	67,95%	68,65%),	68,84%	69,37%

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

Tabel 1.65 Pertumbuhan IPM Kabupaten Blora

Tahun	Pertumbuhan IPM Kabupaten Blora
2021	0,53 poin
2020	0,53 poin
2019	0,70 poin
2018	0,43 poin

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Dimasa pandemi Covid-19, dimensi IPM Kabupaten Blora tahun 2020 tetap mengalami peningkatan. Menurut BPS Kabupaten Blora (2022) persebaran IPM Kecamatan ataupun Desa di Kabupaten Blora diambil melalui *survey* yang dilakukan oleh BPS, dan selanjutnya dihimpun untuk dihitung dengan hasil meningkat. Dimensi Kesehatan memuat UHH meningkat 0,18 poin dari 74,23 tahun menjadi 74,41 tahun. Dimensi Pendidikan memuat HLS hanya meningkat 0,01 poin dari 12,19 tahun menjadi 12.20 tahun. Berbeda dengan dimensi lainnya, Dimensi Standar Hidup yang Layak memuat Pengeluaran Rill Per Kapita yang Disesuaikan mengalami penurunan sebesar 224 poin yaitu, dari 9.795 rupiah menjadi 9.571 rupiah. Jika dibandingkan perolehan capaian dimensi IPM Jawa Tengah, dimensi IPM Kabupaten Blora juga masih dibawah rata-rata. Meskipun pada tahun 2019, UHH Kabupaten Blora sama dengan UHH Provinsi Jawa Tengah. Dari penjelasan menunjukan bahwa meskipun peningkatan capaian dimensi IPM Kabupaten Blora terjadi di setiap tahunnya, tetapi fakta peningkatan ini masih belum cukup untuk bersaing diantara Kabupaten/Kota karena masih dibawah rata-rata dimensi IPM Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.66 Capaian Dimensi IPM Kabupaten Blora

Tahun	Kesehatan (UHH)	Pendidikan (HLS)	(RLS)	Standar Hidup yang Layak (Pengeluaran rill per kapita)
2020	74,41	12,20	6,83	9.571
2019	74,23	12,19	6,58	9.795

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Blora 2022

Pernyataan didukung, ketika peningkatan IPM Kabupaten Blora tidak selaras dibanding dengan capaian peringkat IPM Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selama 4 (empat) tahun kebelakang (periode 2018-2020), IPM Kabupaten Blora tetap berada diposisi 29 atau 6 (enam) terbawah dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini diperparah oleh analisa RKPD Periode 2016-2020 dan melihat data BPS Provinsi Jawa Tengah, dimana IPM Kabupaten Blora juga terendah dibanding 'Eks Karesidenan Pati' atau daerah terdiri dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Blora. Pengkategorian wilayah ini sesuai wilayah terdekat dan berbatasan langsung Kabupaten Blora.

Melihat lebih pencapaian kategori wilayah. Kabupaten Kudus menjadi wilayah dengan capaian IPM dan peringkat tertinggi se-Eks Karesidenan Pati, dimana pada tahun 2021 memperoleh 75,16% (Tinggi) dan peringkat 10 IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Diikuti Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati dengan IPM masing-masing sebesar 72,36% (peringkat 17) dan 72,28 (peringkat 19). Diperdalam dengan analisa dimensi IPM, UHH tertinggi berasal dari Kabupaten Kudus dengan capaian 76,68 tahun dan terendah Kabupaten Blora sebesar 74,51 tahun. HLS dan RLS juga tertinggi berasal dari Kabupaten Kudus dengan masing-masing capaian 13,24 tahun dan 8.76 tahun. HLS terendah dari Kabupaten Rembang 12,12 tahun, dan RLS terendah Kabupaten Blora dengan capaian 6,99 tahun.

Untuk Pendapatan Rill Per Kapita yang Disesuaikan tertinggi masih Kabupaten Kudus dengan 11.272 rupiah dan terendah Kabupaten Blora sebesar 9.669 rupiah. Jika dibandingkan, capaian IPM ataupun capaian dimensi pembentuknya Kabupaten Blora masih dikatakan rendah dibanding dengan daerah sekitarnya. Bahkan capaian dimensi IPM Kabupaten Blora hampir semua berada di posisi terendah. Kondisi ini mengharuskan Pemerintah Daerah harus berupaya memberikan perhatian dalam pencapaian IPM. Capaian IPM tidak hanya mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat tetapi juga daya saing daerah.

Tabel 1.67 Perbandingan Peringkat IPM Eks Karesidenan Pati

No.	Eks Karesidenan Pati Kabupaten/Kota	Peringkat IPM Jawa Tengah (2018-2021)			
		2018	2019	2020	2021
1.	Kabupaten Rembang	21	20	21	21
2.	Kabupaten Pati	19	19	19	19
3.	Kabupaten Grobogan	24	24	24	23
4.	Kabupaten Jepara	15	17	17	17
5.	Kabupaten Kudus	8	8	9	10
6.	Kabupaten Blora	29	29	29	28

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Tabel 1.68 Perbandingan Dimensi IPM

Kabupaten/Kota	Dimensi Kesehatan	Dimensi Pendidikan		Dimensi Standar Hidup yang Layak
	UHH	HLS	RLS	Pendapatan Rill Per Kapita
Kabupaten Rembang	74,61	12,12	7,30	10,519
Kabupaten Pati	76,27	12,94	7,48	10,506
Kabupaten Grobogan	74.84	12.44	7.11	10.294
Kabupaten Jepara	75.91	12.76	7.79	10.536
Kabupaten Kudus	76.68	13.24	8.76	11.272
Kabupaten Blora	74.51	12.35	6.99	9.669

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021